

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DALAM PENGEMBANGAN USAHA PANGAN
MASYARAKAT (PUPM)**

SKRIPSI

Oleh :

**DANDI FEBRI LIANDI
NIM. 160801010**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dandi Febri Liandi
NIM : 160801010
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 11 Januari 2022

Yang Menyatakan;



METERAI
TEMPEL
6E0AJX244870027

Dandi Febri Liandi
NIM. 160801010

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM
PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Dandi Febri Liandi
NIM. 160801010

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

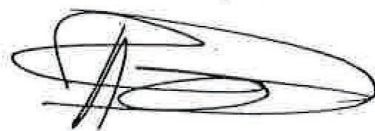
A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

Pembimbing II,



Renaldi Safriansyah, M.H.Sc., M.P.M
NIP. 2007017903

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

Dandi Febri Liandi
NIM.160801010

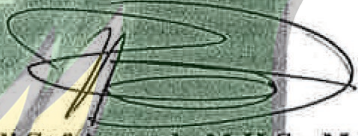
Pada Hari / Tanggal
Rabu : 18 Januari 2022
16 Jumadil Akhir 1443

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

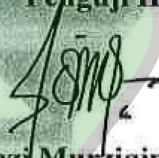
Sekretaris


Renaldi Safriansyah, M.H.Sc., M.P.M
NIP.2007017903

Penguji I


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

Penguji II


Ramzi Murziqin, M.A
NIP. 19605132019031006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh




Dr. Eripta Dewi, S. Ag., M. Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah Aceh Selatan dalam menjamin ketahanan pangan khususnya pada bidang tanaman padi masih belum maksimal karna itu dibutuhkan peningkatan jumlah lahan dan produksi padi di Kabupaten Aceh Selatan, namun Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tujuan bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat dan apa saja peluang dan tantangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan suatu metode yang kita kenal dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: strategi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat ialah dengan membentuk balai penyuluh, sosialisasi pengembangan dan ketahanan pangan masyarakat, pemberian bibit dan pupuk kepada masyarakat petani, penambahan irigasi, mengembangkan kawasan agropolitan dan menetapkan kawasan strategis lumbung padi di Kabupaten Aceh Selatan, adapun peluang Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat kuatnya kerja sama elemen pemerintah dalam pengembangan usaha pangan masyarakat, tersediaanya benih yang unggul, semangat masyarakat dalam Bertani yang tinggi, ketersediaan lahan pertanian pangan yang memadai, dukungan fasilitas dan obat-obatan yang cukup. Sedangkan tantangan Pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan alokasi anggaran yang terbatas, serangan penyakit dan hama terhadap usaha tani masyarakat, terjadinya gagal panen dan tenaga sumber daya manusia petani yang masih minim.

Kata Kunci: *Strategi, Pemerintah Aceh Selatan, Pengembangan Usaha Pangan.*



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)”**. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibuk Dr.Ernita Dewi,S.Ag.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Bapak Dr.Abdullah Sani,MA, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

3. Bapak Dr.Muslim Zainuddin,M.Si, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Renaldi Safriansyah,M.HSc sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemeinahan UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 11 Januari 2022
Penulis,

Dandi Febri Liandi

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Kebijakan Publik	8
2.1.2 Pembangunan Sektor Pangan	14
2.1.3 Tahap-Tahap Pembangunan Sektor Pangan.....	17
2.1.4 Syarat-Syarat Pembangunan Sektor Pangan	19
2.2. Pembahasan Penelitian yang Relevan.....	24
 BAB III METODE PENELITIAN	 27
3.1 Pendekatan Penelitian	27
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.5 Informan Penelitian	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.2 Hasil Penelitian.....	38
 BAB V PENUTUP.....	 60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bidang pertanian adalah salah satu sektor penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, karena sebagian besar rakyat Indonesia mengkonsumsi beras dan bekerja di sektor pertanian.¹ Sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap pembentukan produk domestik bruto dan ekspor.²

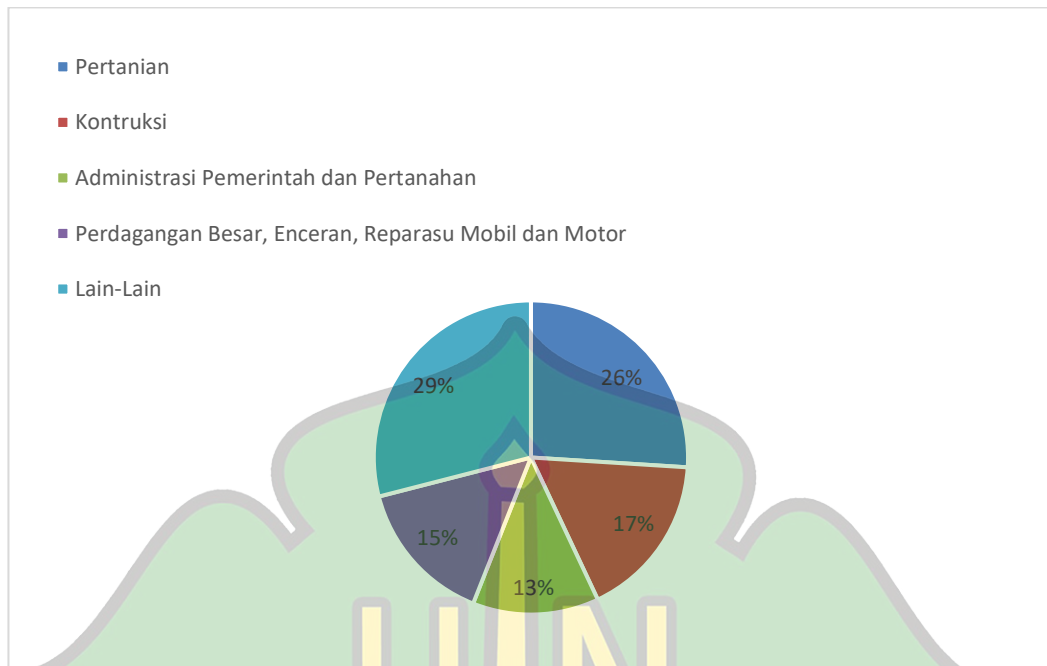
Kabupaten Aceh Selatan merupakan daerah dengan sumber perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, dengan penghasilan masyarakat lebih dari 70% berasal dari sektor pertanian baik sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa bidang pertanian. Salah satu kebijakan prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada bidang pertanian adalah tanaman padi, hal ini terbukti dengan dinobatkannya Kabupaten Aceh Selatan sebagai lumbung padi nasional.³

Adanya apresiasi yang dinobatkan kepada Kabupaten Aceh Selatan sebagai kawasan memiliki keunggulan di bidang pangan, khususnya pertanian padi, menunjukkan keberhasilan dari pemerintah dalam mengelola pertanian yang terdapat di Aceh Selatan. Tinggi kontribusi di sektor pertanian ini dapat dilihat pada data PDRB Kabupaten Aceh Selatan periode tahun 2020.

¹ Robinso Tarigan, *Ekonomi Regional Teori & Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Perkasa, 2012), hal. 46.

² Tulus T.H Tambunan, *Perkembangan Sektor Pertanian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hal. 23.

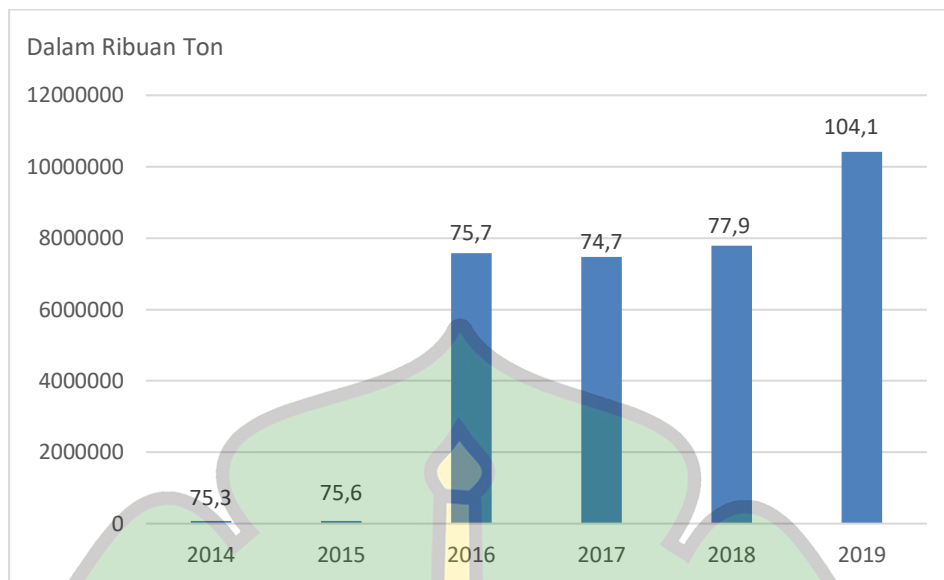
³ Zakiah, Pemetaan Komoditas Unggulan Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Agrisepe Vol (16) Nomor 1* , 2015, hal. 8.



Sumber: PDRB Aceh Selatan, 2020

Berdasarkan grafik di atas, maka terlihat bahwa pertumbuhan sektor pertanian menyumbang 29% terhadap perekonomian kabupaten Aceh Selatan. Sektor pertanian tersebut terutama didominasi oleh pertanian padi masyarakat. Pengembangan sektor pertanian padi di Kabupaten Aceh Selatan ini terlihat terus mengalami peningkatan dimasa pemerintahan saat ini.

Adanya peningkatan secara drastis semenjak pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan saat ini, terutama terjadi dimasa awal pemerintahannya yakni angka kenaikan produksi padi masyarakat mencapai sebesar 104.105,11 ton di bandingkan masa periode akhir pemerintah sebelumnya yang hanya mencapai puncak produksi padi sebesar 77.920,3 ton pertahun. Untuk lebih jelas angka kenaikan produksi padi di Kabupaten Aceh Selatan tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka, 2014 dan 2019.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh Selatan dalam menggerakkan sektor tanaman padi dimasa pemerintahan Tengku Amran patut diberikan penghargaan, kendatipun demikian data statistik justru menggambarkan perbedaan dalam hal peningkatan hasil produksi tanaman padi dengan penurunan hasil panen dari masa pemerintahan periode sebelumnya ke pemerintahan saat ini. Pada masa pemerintahan sebelumnya yakni periode hingga tahun 2017 tingkat pencapaian kontribusi sektor pangan dan holtikultura di Kabupaten Aceh Selatan hanya mencapai 37,80%. Angka ini tentu belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.⁴

Melihat kondisi hasil panen sektor pangan di Aceh Selatan tersebut, tentu tidak terlepas dari dinamika politik yang sedang berkembang di Aceh Selatan, Bupati sebagai pengambil kebijakan tentunya mempunyai agenda politik tersendiri dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Sebagai contoh

⁴ PDRB Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018

pada masa Tengku Amran prioritas tanaman padi sebagai sektor unggulan sangat terasa, bahkan Tengku Amran sering terjun langsung dalam setiap kegiatan rakyat, Tengku Amran juga sering mengadakan perlombaan agar petani padi termotivasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen padi. Terlepas dari itu semua itu, pemerintah Aceh Selatan yang saat ini dipimpin oleh Tengku Amran memiliki perhatian penuh terhadap produksi pertanian. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari pandangan Tengku Amran terhadap petani sebagai lumbung suara yang terbesar bagi pemilihan di Aceh Selatan.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi atau kebijakan pemerintah Aceh Selatan dalam menjamin ketahanan padi di Kabupaten Aceh Selatan dan menjelaskan peluang dan tantangan yang dialami oleh pemerintah Aceh Selatan dalam menjamin ketahanan padi di Kabupaten Aceh Selatan. Kebijakan pemerintah dalam menjamin ketahanan pangan khususnya pada bidang tanaman padi di Kabupaten Aceh Selatan adalah pengadaan Pupuk dan Bibit, Alat penunjang pertanian dan pengelolaan air akan tetapi berbeda dalam hal pelaksanaan dilapangan dan teknik kebijakannya.

Strategi kebijakan tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Aceh Selatan berupa faktor alam, faktor pelaksanaan dan faktor masyarakat. Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan saat ini dalam hal kebijakan harus lebih konsisten lagi dalam hal menjamin ketahanan pangan tanaman padi dan disarankan kepada petani padi agar menerima pola perubahan sistem pertanian yang dirancang oleh pemerintah, karena pada dasarnya setiap sistem yang dilakukan telah melalui proses pertimbangan dengan semua pihak demi

kepentingan bersama dan untuk hasil panen yang lebih maksimal. Tidak hanya sebatas dalam usaha pertanian padi, melainkan juga dilakukan dalam bidang pertanian lainnya, seperti palawija dan sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul: **“Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Kajian ini fokus pada aspek strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat, serta peluang dan tantangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?
2. Apa saja peluang dan tantangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi untuk pencapaian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat.

2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat.

1.4 Kegunaan penelitian

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan mampu memebrikan informasi yang bersifat ilmiah demi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai strategi Pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, tulisan ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih manfaat bagi pihak terkait, di antaranya:

- a. Untuk pemerintah dalam hal ini Kabupaten Aceh selatan, penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi untuk pemerintahan kabupaten Aceh Selatan dalam hal ini Eksekutif. Dalam hal pengembangan usaha pangan masyarakat.
- b. Untuk masyarakat terutamanya tulisan ini agar dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan dan evaluasi dalam meningkatkan partisipasi terhadap strategi pemerintah yang dalam hal ini kabupaten Aceh Selatan dalam upaya mengembangkan usaha pangan masyarakat.

- c. Untuk peneliti sendiri, semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan juga bagian dari upaya pencerdasan dalam hal ini mengenai pengembangan usaha pangan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kebijakan Publik

Setiap penelitian ilmiah tentu saja memiliki teori atau pisau analisa yang di gunakan untuk meneliti suatu permasalahan yang kemudian juga di gunakan sebagai pisau analisa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kebijakan publik untuk meneliti mengenai topic Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Maka dari itu kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan merupakan serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dari dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai target pekerjaan dan juga suatu sasaran. Sedangkan secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa penyebutan istilah kebijakan (*policy*) bermula dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Dalam bahasa yunani kebijakan dapat di artikan dengan *polis* yang bermakna “negara kota”.⁵

Kemudian untuk lebih memahami mengenai kebijakan salah satu pemikir politik bernama Carl Friedrich menjelaskan bahwa:

“Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi

⁵ Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2014), h. 32.

*dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.*⁶

Dari definisi tersebut dapat kita maknai bahwa kebijakan merupakan serangkaian program atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu pula. Selanjutnya Abidin memberikan gambaran mengenai kebijakan yaitu disetiap formulasi kebijakan harus ada beberapa hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones dalam Abidin mendefinisikan kebijakan yaitu: “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan.”⁷

Secara umum dalam membedakan mengenai definisi kebijakan dapat di rumuskan kedalam 3 bagian yaitu; Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.⁸

Dari penjelasan di atas maka kebijakan dapat di artikan sebagai serangkaian pedoman atau suatu pelaksanaan yang menjadi rujukan petunjuk yang

⁶ Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*, (Yogyakarta: Analisis. Gava Media, 2016), h. 109.

⁷ Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2014), h. 28

⁸ Abidin, *Kebijakan Publik...*, h. 28.

meliputi peraturan yang akan dikeluarkan. Kebijakan tersebut ada yang bertingkat pusat, daerah dan kabupaten/kota.

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.⁹ Kemudian adapun Aderson dan Winarno menjelaskan mengenai konsep kebijakan publik yang memiliki beberapa implikasi yang meliputi, yakni:¹⁰

1. Penempatan kperhatian kebijakan public meliputi orientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku semata.
2. Kebijakan publik juga mencakup secara menyeluruh dalam praktek politik di dunia modern bukan hanya yang terjadi begitu saja melainkan juga merupakan perluasan dalam suatu sistempolitik.
3. Kebijakan tersebut juga dapat dilihat sebagai arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan keputusan individual.

Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suau hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah. Kebijakan publik

⁹ Winarno dan Anderson, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, (Yogyakarta :Med. Press. 2017), h. 67

¹⁰ Winarno dan Anderson, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, (Yogyakarta :Med. Press. 2017), h. 67

juga bisa di klasifikasikan kedalam nilai positif dan negatif, kebijakan positif itu mengartikan bentuk dalam sifat yang positif yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian kebijakan negatif memiliki, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukannya. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mengarah kepada aturan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Kebijakan akan menentukan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan.

Secara pemahaman khalayak kebijakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu aturan yang ditulis secara resmi dan merupakan hasil dari keputusan bersama yang formal, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau

lembaga dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.¹¹

Kemudian kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya dan suatu evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Maka kebijakan harus dirumuskan demi sasaran organisasi atau kelompok.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Di samping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang dimaksud. Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah dan lembaga, serta perilaku lembaga tersebut pada umumnya.

Untuk melihat kondisi lapangan terhadap apa yang terjadi dilapangan maka peneliti menggunakan teori kebijakan yang dikemukakan oleh James Anderson¹² mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dalam harus diikuti dan dilaksanakan oleh individu atau organisasi tertentu. Kemudian membahas mengenai konsep kebijakan tersebut relevan menggunakan teori tersebut.

¹¹ http://repository.radenintan.ac.id/2100/3/BAB_2.pdf

¹² Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2010). *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kemudian kaitannya dengan kajian yang sedang peneliti teliti adalah memfokuskan kepada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha masyarakat, baik kebijakan secara umum maupun khusus, yang bersifat formal ataupun non formal. Tahap-tahap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Selatan ini dikaji berdasarkan teori yang dikemukakan oleh William Dunn sebagai mana dikutip oleh Winarno yaitu:¹³

Tahap penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk keagenda kebijakan para perumus dari suatu formula kebijakan yang akan di implementasikan; tahapan formulasinya, masalah yang sedang terjadi harus masuk kedalam agenda yang kemudian akan dibahas oleh pemangku kebijakan.masalah-masalah yang dipetakan akan dirumuskan bersama untuk mencari kebijakan yang cocok yang dapat menyelesaikan masalah tersebut berupa solusi terbaik. Dalam proses memecahkan masalah maka akan melahirkan beberapa alternative yang merupakan hasil dari pada persetujuan bersama perumus kebijakan dan nantinya akan melahirkan pilihan alternative kebijakan yang tepat; langkah selanjutnya adalah tahapan adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya perumus pula yang akan menentukan kebijakan mana yang tepat untuk ditetapkan melalui kepengtingan dan dukungan mayoritas legislative, secara

¹³ Winarno dan Anderson, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, h. 69 – 70.

consensus, antara direktur lembaga atau pihak peradilan; Tahapan terakhir adalah implementasi dari kebijakan yang sudah disahkan melalui langkah sebelumnya. Dengan implementasi ini pula maka kebijakan tersebut secara sah dijalankan di suatu daerah yang memformulasikan kebijakan tersebut melalui badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah; Tahapan terakhir adalah evaluasi pasca implementasi kebijakan ini, apakah dapat diterima dan menjadi rujukan masyarakat atau kebijakan ini tidak relevan di masyarakat. Dengan adanya evaluasi kemudian kebijakan ini dapat dirumuskan sesuai keadaan masyarakat sehingga berdampak dan sesuai dengan keinginan masyarakat mayoritas.

2.1.2 Pembangunan Sektor Pangan

Melihat peranan dalam sektor pangan dalam menunjang terwujudnya kemandirian ekonomi, maka sangat penting karena sebagian anggota masyarakat di Indonesia sebagai salah satu negara ketiga bergantung hidupnya pada sektor pembangunan. Para perencana harus sungguh-sungguh dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar dari sekumpulan masyarakat yang merupakan bertahan hidup pada sektor pertanian. Cara tersebut pula dapat dijalankan dengan meningkatkan produksi atau meningkatkan daya tanam tanaman pangan dan juga tanaman industri perdagangan demi menaikkan taraf hidup dari produk-produk yang kita produksi dan mendapatkan nilai jual tinggi. Dengan cara demikian pula kita secara tidak langsung meningkatkan keuntungan penduduk desa atau petani rumah tangga. Sebab lahirnya sistem pekerbunan-

pekerbunan besar, hanya menguntungkan petani dengan modal besar atau petani kaya. . kenaikan *output* pertanian tersebut bukan syarat yang cukup untuk mencapai kenaikan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun merupakan syarat yang penting. Dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian, pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan menjadi sebuah syarat utama. Sistem pangan nasional tersebut secara kolaboratif meningkatkan produksi pangan yang berkualitas dan aman, didukung oleh lingkungan yang kondusif, stabilitas akses pangan, efisiensi distribusi pangan, serta pemberian bantuan pangan bagi rumah tangga rawan pangan.¹⁴

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Padat pula diartikan sebagai proses multidimensional menuju ke arah yang lebih baik namun dilihat dari segi pendapatan dan output, atau lebih menitik beratkan pada aspek kuantitas saja.

Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang menaik. Namun tidak berarti pendapatan perkapita akan menunjukan suatu grafik kenaikan secara terus menerus, kejadian resesi ekonomi juga berdampak pada tingkat perekonomian yang menurun. Perlu dicatat pula bahwa kegiatan politik juga ikut mempengaruhi kenaikan atau penurunan perekonomian suatu bangsa.

¹⁴ <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3556/pengembangan-sistem-pangan-yang-berkelanjutan-menjadi-syarat-utama-peningkatan-peran-sektor-pertanian>

Pertanian sangat terikat dengan teori pertumbuhan the law of diminishing return dari David Ricardo yang menjelaskan bahwa pertumbuhan pada sektor pertanian juga merupakan terbatasnya pada aspek kuantitatif atau pendapatan dan pengeluaran saja namun di dalam sektor pertanian ternyata berlaku fluktuatif produksi akibat penggunaan faktor produksi yang telah digunakan sehingga dalam kenyataannya terdapat bahwa ada hukum hasil yang semakin berkurang dari konsep ini *the law of diminishing returns* berkenaan dengan apa yang dikemukakan dalam teori tersebut menyatakan bahwa apabila ada pengeluaran variabel yang dimasukkan kembali penggunaannya sedangkan pemasukan lain tetap maka tambahan pengeluaran yang berhasil atau dihasilkan dari setiap tambahan satu bagian pengeluaran kemudian ditambahkan kembali terhadap menurun apabila variabel tersebut terus ditambah maka demikianlah suatu teori David Ricardo yang dapat kita definisikan untuk melihat penelitian yang meneliti lakukan saat ini.¹⁵

Dalam konsep pertanian input merupakan tanah yang bersifat tetap, berapapun variabel yang digunakan ketika menggunakan tanah tersebut inputnya tetap tanah dan input variabel input adalah tenaga kerja dan modal jadi ketika tenaga kerja bertambah dan modal semakin sedikit juga tidak akan relevan dalam memulai atau menggunakan atau memanfaatkan sebidang tanah untuk pertanian dalam ketahanan pangan.¹⁶

¹⁵ David Richardo, *Teori Pertumbuhan Klasik*, (Jakarta:Raja Grafindo Pustaka, 2008), h. 107

¹⁶ Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal. 58-61.

2.1.3 Tahapan Pembangunan Sektor Pangan

Dalam sektor pengembangan atau pembangunan pangan, maka terdapat tiga tahapan yang menjadi fokus tertentu pengembangan dan pembangunan pangan. Ketiga tahapan tersebut adalah:¹⁷

1. Pertanian Tingkat Tradisional

pertanian tradisional ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani, sehingga tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kebutuhan manusia pada pangan telah membawa manusia mulai bisa belajar tentang bertanam meskipun dengan alat yang sederhana. Hal tersebut yang menjadi ciri dari pertanian ini.¹⁸

Melihat pangan tradisional maka dapat pula dilihat produksi dan konsumsi yang sama banyaknya jadi hanya 1 atau 2 tanaman saja, pertanian tradisional kebanyakan menanam jagung atau padi karena petani menganggap itu merupakan komoditas utama sebagai sumber pokok bahan makanan produksi dan produktivitasnya sebenarnya rendah karena di pertanian tradisional masih menggunakan peralatan yang tradisional pula atau peralatan sederhana teknologi yang dipakai untuk pertanian juga masih rendah proses penanaman atau penggunaan modal hanya sedikit saja sedangkan variabel tanah dan tenaga kerja merupakan faktor yang paling dominan dalam pertanian tradisional jika dilihat dari sudut pandang keuntungan pertanian tradisional juga tidak begitu menguntungkan karena kalah teknologi.

¹⁷ Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal. 62.

¹⁸ <https://www.kemilaudesa.com/blog/pertanian-tradisional-tujuan-dan-manfaatnya/>

Pada tahap ini hukum penurunan hasil (*law of diminishing return*) berlaku karena terlampaui banyak tenaga kerja yang pindah bekerja di lahan pertanian yang sempit. Kegagalan panen karena hujan (banjir), atau kurang suburnya tanah, atau karena tindakan-tindakan pemerasan oleh para rentenir, merupakan hal yang sangat ditakuti oleh para petani. Tenaga kerja banyak yang menganggur sepanjang tahun, walaupun para pekerja tersebut mungkin bekerja penuh pada musim tanam dan musim panen.

Para petani biasanya hanya menggarap tanah yang bisa digarap oleh keluarganya, tanpa memerlukan tenaga kerja bayaran. Keadaan lingkungan sangat statis, teknologi sangat terbatas dan sederhana, sistem kelembagaan sosial, pasar-pasar terpencar jauh, serta jaringan komunikasi antara daerah pedesaan dan perkotaan yang kurang memadai cenderung akan menghambat perkembangan produksi. Dalam keadaan demikian, kekuatan motivasi utama dalam kehidupan para petani ini barangkali bukanlah meningkatkan penghasilan, tetapi berusaha untuk bisa mempertahankan kehidupan keluarganya.

2. Tahap Pangan Tradisional Menuju Pangan Modern

Tahap kedua adalah tahap penganekaragaman produk pangan sudah mulai terjadi dimana produk pertanian sudah ada yang dijual ke sektor komersil, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih rendah mungkin merupakan suatu tindakan yang tidak realistis jika menstransformasi secara cepat suatu sistem pertanian tradisional ke dalam sistem pertanian yang modern (komersial). Upaya untuk mengenalkan

tanaman perdagangan dalam pertanian tradisional seringkali gagal dalam membantu petani untuk meningkatkan kehidupannya. Menggantungkan diri pada tanaman perdagangan bagi para petani kecil lebih mengundang resiko daripada pertanian subsistem murni karena resiko fluktuasi harga menambah keadaan menjadi lebih tidak menentu.¹⁹

3. Pangan Modern

Tahap yang ketiga adalah tahap yang menggambarkan pangan modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh pemakaian modal dan teknologi yang tinggi pula. Pada tahap ini produksi pertanian seluruhnya ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersil. Pertanian modern (spesialisasi) bias berbeda-beda dalam ukuran dan fungsinya. Mulai dari jenis pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditanam secara intensif, sampai pada pertanian gandum dan jagung yang sangat besar seperti di Amerika Utara. Hampir semua menggunakan peralatan mekanis yang sangat hemat tenaga kerja, mulai dari jenis traktor yang paling besar dan mesin-mesin panen yang modern, sampai pada teknik-teknik penyemprotan udara yang memungkinkan satu keluarga bisa mengolah dan menanam beribu-ribu hektar tanah pertanian.

2.1.4 Syarat-Syarat Pembangunan Sektor Pangan

Dalam setiap pembangunan pangan tentu memiliki syarat-syarat dalam mengklasifikasi cara-cara maka perlu adanya pengelompokan syarat-syarat pembangunan tersebut adapun dalam pengelompokan syarat-syarat pertanian

¹⁹ Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal. 63.

pangan terbagi menjadi dua syarat mutlak dan syarat pelancar syarat-syarat mutlak merupakan:²⁰

1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani

Pembangunan pertanian yang dibangun secara merata dan menyeluruh dapat meningkatkan produksi dari hasil-hasil usaha tani kemudian hasil ini tentunya akan dipasarkan dan diperjualbelikan dengan harga yang cukup tinggi untuk menutupi biaya dan tenaga kerja yang telah dikeluarkan oleh petani saat melakukan proses produksi kemudian dalam memasarkan hasil atau produk pertanian ini maka diperlukan adanya permintaan dari hasil pertanian tersebut sistem pemasaran dan juga kepercayaan para petani pada sistem yang dibangun untuk mengelola pemasaran sehingga permintaan dapat diimbangi dengan penyediaan barang yang sudah melalui proses tahapan produksi. Teknologi yang senantiasa berkembang.

2. Teknologi pertanian berarti cara-cara bertani.

Setiap pertanian tentu saja memiliki cara-cara bertani atau yang lebih lazim dikenal dengan teknologi pertanian adapun teknologi pertanian tersebut termasuk cara-cara bagaimana para petani dalam melakukan pertanian seperti menyebar benih memelihara tanaman dan juga memungut hasil serta melakukan pemeliharaan sumber tenaga yang dimiliki kemudian juga termasuk kombinasi berbagai jenis usaha oleh para petani agar kemudian dapat menggunakan tanah dan tenaga mereka semaksimal mungkin.

²⁰ Mosher, *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*, (Jakarta: Yasaguna, 2014), hal. 13

3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal

Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara massal dan dapat diakses dengan cepat juga merupakan sebagian besar metode yang dapat meningkatkan hasil pertanian dalam melakukan pertanian memerlukan penggunaan bahan dan alat produksi antara lain pupuk obat-obatan memberantas hama makanan obat ternak dan tentunya bibit dalam membangun pertanian diperlukan semua faktor tersebut di atas agar tersedianya diberbagai tempat dalam jumlah ah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari petani dalam mengelola pertaniannya.

4. Adanya perangsang produksi bagi petani

Tersedianya perangsang produk bagi petani untuk memenuhi kebutuhan petani tersebut sebab para petani sebagai pengelola tentunya menginginkan kehidupan yang layak terhadap dirinya dan keluarganya hal tersebut juga menjadi faktor utama yang merangsang petani lebih antusias untuk meningkatkan produksi mereka perangsang paling baik adalah yang bersifat ekonomis sebab faktor perangsang tersebut merupakan harga dari hasil produksi pertanian yang mereka harapkan selalu menguntungkan kemudian pembagian hasil yang dilakukan juga harusnya lebih wajar dan tersedianya barang barang dan jasa yang mereka inginkan dan perlukan baik untuk petani maupun keluarganya untuk terjaminnya kesejahteraan petani tersebut.

5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu

Syarat mutlak yang terakhir yang harus dimiliki yaitu pengangkutan sebab tersedianya pengangkutan yang lancar dan berkesinambungan mempengaruhi terhadap pengelolaan dari hasil pertanian hal tersebut juga akan membantu kehidupan yang layak terhadap petani dan keluarganya sehingga rangsangan yang diterima oleh petani akan lebih antusias untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian mereka mereka juga menginginkan jasa pengangkutan yang tersedia itu efisien dan murah jika keseluruhan syarat ini dapat dipenuhi maka tidak menutup kemungkinan bahwa ketahanan pangan akan menjadi salah satu cita-cita yang mudah untuk dicapai di kemudian hari

Selain daripada syarat mutlak yang sudah kita bahas di atas untuk memperlancar sektor pembangunan pangan maka dibutuhkan syarat-syarat pelancar menurut Mosher syarat-syarat pelancar adalah sebagai berikut:²¹

1. Pendidikan pembangunan

Pendidikan merupakan syarat paling penting dalam pembangunan sebab pendidikan menitikberatkan suatu kursus-kursus atau latihan latihan penyuluhan penyuluhan dan sebagainya sebab pendidikan merupakan instrumen penting untuk pembangunan ini yang bertujuan meningkatkan produktivitas petani dengan pendidikan pula proses pemanfaatan teknologi akan lebih mudah karena para petani mulai tercerdaskan.

2. Kredit produksi

Selain daripada pendidikan faktor pelancar dari pada suatu pertanian itu merupakan kredit produksi yang berperan agar para petani tidak harus

²¹ Mosher, *Menggerakkan dan Membangun Pertanian...*, hal. 14.

lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli bibit unggul obat-obat pemberantasan hama pupuk dan alat-alat lainnya karena tidak semua petani memiliki keuangan yang mapan untuk memulai suatu pertanian makanya dibutuhkan lembaga pengkreditan yang memberikan kredit produksi bagi petani sehingga kelancaran sektor pembangunan pangan dapat dicapai.

3. Kegiatan gotong royong petani

Kegiatan gotong royong merupakan salah satu aspek untuk memperlancar pertanian karena terjadinya kerjasama antar petani dibutuhkan untuk menanam dan dalam proses menanam tanaman mereka juga membutuhkan prosedur gotong royong kemudian saat memanen hasil panen juga dibutuhkan kerja sama yang baik.

4. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian

Perbaikan dan perluasan tanah pertanian atau yang sering kita dengar dengan pembukaan lahan baru itu dibutuhkan untuk pembangunan pertanian sebab hal tersebut ditujukan untuk menaikkan hasil panen setiap tahunnya semakin luas lahan yang kita buka maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan hasil yang banyak dan juga dapat mempercepat pembangunan pertanian selain daripada perbaikan dan perluasan tanah maka juga dibutuhkan suplai pupuk dan juga pembangunan irigasi yang terkoordinir dengan baik.

5. Perencanaan nasional pembangunan pertanian

Perencanaan pertanian itu dibutuhkan secara menyeluruh terstruktur dan sistematis dari tingkat nasional yang dilakukan oleh pemerintah sebab hal ini mengenai tiap kebijaksanaan dan kegiatan yang mempengaruhi

pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu sehingga dengan adanya perencanaan ini maka di setiap akhir jangka waktu dapat dievaluasi bersama demi terwujudnya pertanian yang dibangun secara terintegrasi.

2.2 Pembahasan Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini dijelaskan terkait uraian penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori. Kajian terdahulu yang relevan ialah karya-karya terdahulu yang menyangkut strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam pengembangan sektor pertanian yang dianggap memiliki relevansi dengan objek kajian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya:

Kajian Rizki Irfan dengan judul *“Analisis Perbandingan Kebijakan Bupati Akmal Ibrahim dan Jufri Hasanuddin dalam Menjamin Ketahanan Pangan Pada Bidang Padi di Kabupaten Aceh Barat Daya”*. Hasil penelitian menunjukkan Perbandingan kebijakan bupati Akmal Ibrahim dengan bupati Jufri Hasanuddin dalam menjamin ketahanan pangan khususnya pada bidang tanaman padi di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sama dalam hal kebijakannya pengadaan Pupuk dan Bibit, Alat penunjang pertanian, dan pengelolaan air akan tetapi berbeda dalam hal pelaksanaan dilapangan dan teknik kebijakannya. Adapun Kendalayang dialami Bupati Akmal Ibrahim dan Bupati Jufri Hasanuddin dalam Menjamin Ketahanan Pangan Khususnya pada bidang tanamanpadi di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sama yaitu faktor alam, faktor pelaksanaan, dan faktor masyarakat akan tetapi berbeda dalam hal menghadapi kendala dilapangan. Pemerintahan kabupaten Aceh Barat Daya saat ini dalam hal kebijakan harus lebih

konsisten lagi dalam hal menjamin ketahanan pangan tanaman padi dan disarankan kepada petani padi agar menerima pola perubahan sistem pertanian yang dirancang oleh pemerintah, karena pada dasarnya setiap sistem yang dilakukan telah melalui proses pertimbangan dengan semua pihak demi kepentingan bersama dan untuk hasil panen yang lebih maksimal.²²

Kajian Joko, dkk berjudul “*Strategi Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantul dengan Pendekatan A’WOT*”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa adanya faktor yang menjadi kekuatan utama dalam tujuan pembangunan pertanian adapun faktor-faktor nya adalah aksesibilitas dan infrastruktur yang dibangun dengan baik kelemahan utamanya adalah nilai tawar para petani tradisional itu rendah peluang utamanya adalah frekuensi penyuluhan yang tinggi dan ancaman berupa harga input dari produksi yang meningkat skala prioritas utama strategi pembangunan pertanian di kabupaten Bantul adalah dengan budidaya komoditas unggul di daerah tersebut yaitu padi sawah jagung kacang tanah dan kedelai dan meningkatkan kapasitas serta frekuensi penyuluhan dengan melibatkan kelompok-kelompok.²³

Penelitian Arif Syaifuddin berjudul “*Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dalam Upaya Peningkatan PDRB Kabupaten Pati*”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengembangan komoditas padi terdapat di Kecamatan Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen,

²² Rizki Irfan, Analisis Perbandingan Kebijakan Bupati Akmal Ibrahim dan Jufri Hasanuddin dalam Menjamin Ketahanan Pangan Pada Bidang Padi di Kabupaten Aceh Barat Daya, *Skripsi*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017), hal. ii

²³ Joko, dkk, *Strategi Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantul dengan Pendekatan A’WOT*, Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Vol. 19, No.3, November 2016

Kecamatan Pati, Kecamatan Gabus dan Kecamatan Margorejo. Komoditas tanaman jagung Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Kayen. Komoditas tanaman kedelai Kecamatan kayen, Kecamatan Pati, dan Kecamatan Gabus. Komoditas tanaman kacang tanah Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Gembong. Komoditas tanaman kacang hijau Kecamatan Pati, Kecamatan Gabus, dan Kecamatan Margorejo. Komoditas tanaman ubi kayu Kecamatan Gembong dan Kecamatan Margoyoso. Komoditas tanaman ubi jalar Kecamatan Winong, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jaken, Kecamatan Jakenan dan Kecamatan Wedarijaksa.²⁴



²⁴ Arif Syaifuddin, *Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dalam Upaya Peningkatan PDRB Kabupaten Pati*, Skripsi, (Semarang: UNS, 2013), hal. ii.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian lapangan tentunya memiliki metode penelitian sebelumnya mendefinisikan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang proses yang berlangsung sekarang interaksi suatu sosial baik berupa individu kelompok lembaga maupun masyarakat dalam lingkungan tertentu yang ingin diteliti penelitian lapangan didefinisikan sebagai suatu penelitian yang mengkaji berfokus pada fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²⁵ Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengeta-huan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.²⁶

Kemudian dalam melakukan penelitian itu ada jenis-jenis penelitian peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode deskriptif metode-metode sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki baik seorang lembaga masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya metode deskriptif juga diartikan sebagai metode kualitatif.²⁷

²⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 5

²⁶ Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h. 4.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yokyakarta: Gajahal Mada University Press, 2017), h. 67.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus pada aspek strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat, serta peluang dan tantangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat. Pemilihan aspek aspek pangan dikarenakan terjadinya peningkatan hasil produksi panen sebelum dan sesudah kepemimpinan Teugku Amran, sehingga penting bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut strategi pemerintah Aceh dalam pengembangan usaha pangan masyarakat.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan yang menerapkan kebijakan pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Aceh Selatan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁸ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, dokumentasi dan hasil observasi lapangan.

²⁸ Burhalan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...*, h. 132.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak yang akan menjadi subjek yang akan kita tuju atau yang dituju oleh peneliti untuk diteliti sebagai objek subjek penelitian dipilih secara sengaja dan sadar untuk menjadi informan yang akan memberikan informasi kepada peneliti informasi tersebut merupakan informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini dilakukan dalam metode penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan informan informan merupakan tempat memperolehnya data yang kemudian dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti kemudian informal dalam penelitian ini akan diambil dengan menggunakan teknik sampel yang ditetapkan secara sengaja dan sadar oleh peneliti saat pertama kali menentukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.³⁰

Dalam penelitian ini penulis menentukan kriteria subjek penelitian, yaitu:

(1) orang yang langsung dan berperan sebagai pelaku yaitu pengembangan sektor

²⁹ *Ibid.* 132.

³⁰ Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 67.

pangan dan (2) orang yang dianggap lebih mengerti tentang pembangunan sektor pangan yaitu pihak Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kadis Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan	1 orang
2	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan	1 orang
3	Kelompok Petani Pangan	1 orang
4	Penyuluh pertanian	1 orang
5	Masyarakat petani pangan	1 orang
Total		5 orang

Adapun dalam pemilihan informal atas objek penelitian ini menggunakan sistem sampel yaitu sebuah teknik pengambilan subjek secara disengaja maksudnya peneliti Sudah menentukan sendiri subjek mana yang akan diambil dan tidak menggunakan metode acak tetapi ditentukan oleh peneliti sendiri.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.6.1 Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.³¹ Jenis wawancara dalam penelitian ini ialah wawancara terbuka dan mendalam. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*,h. 118

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³²

Dalam metode penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data primer yang akan memperkuat data yang diperoleh dengan cara observasi dan dokumentasi seperti yang sudah dibahas di atas responden yang akan diwawancarai terdiri dari kepala dinas Pertanian kabupaten Aceh Selatan masyarakat petani penyuluh Pertanian.

Agar wawancara berjalan dengan baik, maka peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

3.6.2 Dokumentasi

Selain wawancara juga menggunakan metode dokumentasi yang merupakan cara pengumpulan data yang dihasilkan dengan cara pencatatan penting yang berhubungan atau berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan pekerjaan saja adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi kegiatan pemerintah dalam sektor pangan sesuai dengan tema penelitian ini laporan tahunan pemerintah Aceh Selatan dan juga sektor pangan dan foto-foto penelitian.

³² Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2016), h. 72

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Tekni keabsahan data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif.

Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data-data tersebut. Keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden.

Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi. Peneliti melakukan Triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari penelitian ini. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu melakukan proses pemilihan antara data primer dan data sekunder untuk melakukan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang banyak dan data-data apa saja yang dibutuhkan sehingga memunculkan catatan-catatan tertulis di lapangan yang dapat dijadikan sebagai data alat bukti dalam penelitian ini reduksi data juga penting untuk dilakukan agar dapat memperpendek membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam melakukan penelitian ini

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah memberi gambaran atau penggambaran juga bisa disebut sebagai pemaparan informasi yang tersusun secara sistematis untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan selain itu dalam metode penyajian data diperlukan adanya sebuah kolom perencanaan dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk hususnya proses penyajian data yang baik dan jelas secara sistematis akan memudahkan peneliti untuk melakukan langkah atau tahapan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian di mana pada tahap penarikan kesimpulan akan diperoleh atau ditarik garis besar benang merah sebagai kesimpulan yang merupakan hasil keseluruhan dari suatu penelitian.³³

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., h. 10-112.

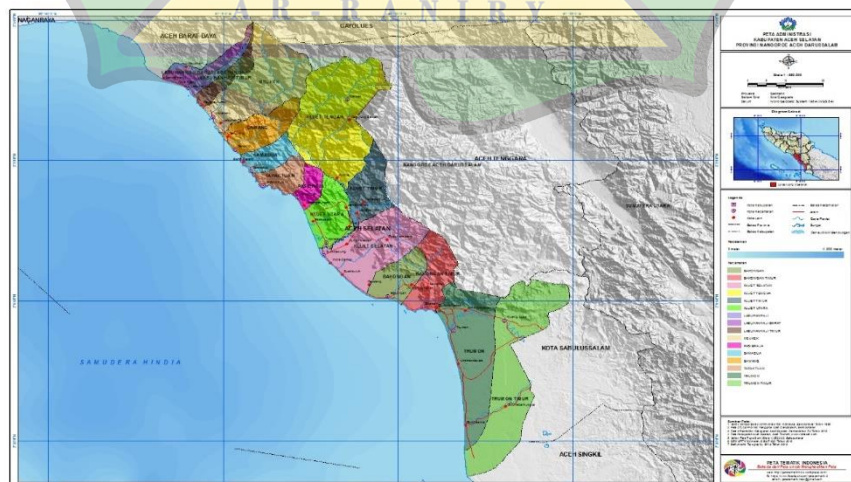
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian

Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Sesuai dengan namanya, Aceh Selatan terletak di daerah Selatan Aceh. Aceh Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, oleh sebab itu, iklim di daerah Aceh Selatan relatif panas. Meskipun begitu, Aceh Selatan selalu jarang dilanda kekeringan. Aceh Selatan seperti terjepit, karena diapit oleh Pegunungan Bukit Barisan dan Samudera Hindia. Letak astronomisnya pada 2 derajat - 4 derajat LU, 96 derajat - 98 derajat BT. Luas wilayah Aceh Selatan sekitar 7% dari luas Provinsi Aceh, dan memiliki kira-kira 250 desa. Suhu udara di Aceh Selatan berkisar antara 28 derajat - 33 derajat. Curah hujan Aceh Selatan berkisar antara 2000 sampai 3700 mm/tahun. Kecepatan angin di Aceh Selatan berkisar 9 - 14 knot.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Aceh Selatan, 2020



Jika melihat gambaran peta di atas maka Aceh Selatan merupakan salah satu daerah yang sangat berpotensi untuk membangun sektor pertanian dan menjadi wilayah swasembada pangan terkhusus di provinsi Aceh karena tata letaknya sangat strategis dan mendukung untuk adanya pertanian.

Adapun batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.³⁴

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956.³⁵ Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan sesuai dengan UU RI Nomor 4 tahun 2002 menjadi tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Labuhan Haji, diikuti oleh Kecamatan Kluet Utara. Sementara jumlah penduduk tersedikit adalah Kecamatan Sawang. Sebagian penduduk terpusat di sepanjang jalan raya pesisir dan pinggiran sungai. Dari sekian banyak Kecamatan di

³⁴ Peta Kabupaten Aceh Selatan, 2020

³⁵ Said Mudhahar Ahmad, *Ketika Pala Mulai Berbunga*, (Jakarta, 1992), h. 10.

Kabupaten penghasil pala tersebut terdapat tiga etnik atau suku yang telah ada sejak lama. Suku tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Suku Aneuk Jamee tersebar di sepanjang pesisir Barat-Selatan Aceh. Dialek yang digunakan suku Aneuk Jamee diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan menurut cerita, mereka memang berasal dari Minang Kabau. Bahasa yang digunakan bukan bahasa padang lagi tapi bahasa Jamee, mirip tapi tidak persis sama. Dalam bahasa Aceh kata “jamee” berarti tamu atau pendatang.
2. Suku Kluwat (Suku Kluet) merupakan salah satu suku yang berada di Aceh Selatan, suku ini paling banyak tersebar di Kecamatan Kluet Timur, Kluet Utara dan Kecamatan Kluet Tengah.
3. Suku Aceh Suku Aceh merupakan suku mayoritas yang terdapat di Aceh Selatan, jika ditotalkan sekitar 60% masyarakat disana bersuku Aceh, dan selebih berasal dari suku Aneuk Jamee dan Kluwat.

Berbicara agama di Kabupaten Aceh Selatan bisa dipastikan 99,99% penganut agama Islam. Kabupaten Aceh Selatan memiliki 18 buah Kecamatan yang terbentang mulai dari Kecamatan Labuhan Haji yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya hingga Kecamatan Trumon Timur yang berbatasan dengan Kota Subulussalam. Pada tahun 2010 jumlah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan adalah 16 Kecamatan. Pada tahun 2011, 2 Kecamatan di bagian Timur yakni Trumon dimekarkan lagi menjadi 2 Kecamatan lagi sehingga keseluruhan Kecamatan dalam Kabupaten sekarang ini berjumlah 18 Kecamatan.

Pencapaian mata pencapaian masyarakat Aceh Selatan terbagi berdasarkan letak tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Secara umum jika dikelompokkan maka dapat dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Bertani

Aceh Selatan terkenal sebagai kabupaten penghasil pala terbanyak di Provinsi Aceh, selain itu tanaman lain yang menjadi mata pencapaian masyarakat seperti, kelapa, kelapa sawit, kopi, pinang, karet, cengkeh dan nilam sangat luas terbentang dari Kecamatan Labuhanhaji Barat hingga Trumon Timur.

2. Melaut

Mata pencapaian sebagai nelayan ini tersebar disepanjang pesisir Kabupaten Selatan mulai dari Labuhan Haji hingga Bakongan, dan terbanyak yang berprofesi sebagai nelayan terdapat di Kecamatan Labuhan Haji, Sawang dan Kecamatan Bakongan.

3. Berdagang

Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di Aceh Selatan Tersebar di tiap-tiap Kecamatan yang ada, terutama di jalan lintasan Medan-Banda Aceh. Profesi ini terlihat semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, dipusat-pusat Kecamatan sudah terlihat banyak pedagang yang membuka usahanya dengan skala besar (grosir).

4. Pegawai Pemerintahan

Selain tiga mata pencapaian di atas, Aceh Selatan juga mempunyai banyak masyarakat yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan, mereka itu

adalah orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi dan setiap tahun jumlahnya terus meningkat.

Khusus masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Kabupaten Aceh Selatan jika dilihat perkembangan dalam beberapa tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik di bawah ini.

4.2 Hasil Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan hasil temuan penelitian terhadap temuan penelitian terkait strategi pemerintah Aceh Selatan dalam mengembangkan usaha pangan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

4.2.1 Perkembangan Sektor Pertanian Pangan di Kabupaten Aceh Selatan

Salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan strategi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengembangkan usaha pangan masyarakat ialah perkembangan di sektor pangan itu sendiri yang dalam hal ini ialah pertanian padi. Usaha pangan padi tersebut ditandai dengan perkembangan luas lahan serta produksi mengalahi jenis pangan lainnya, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

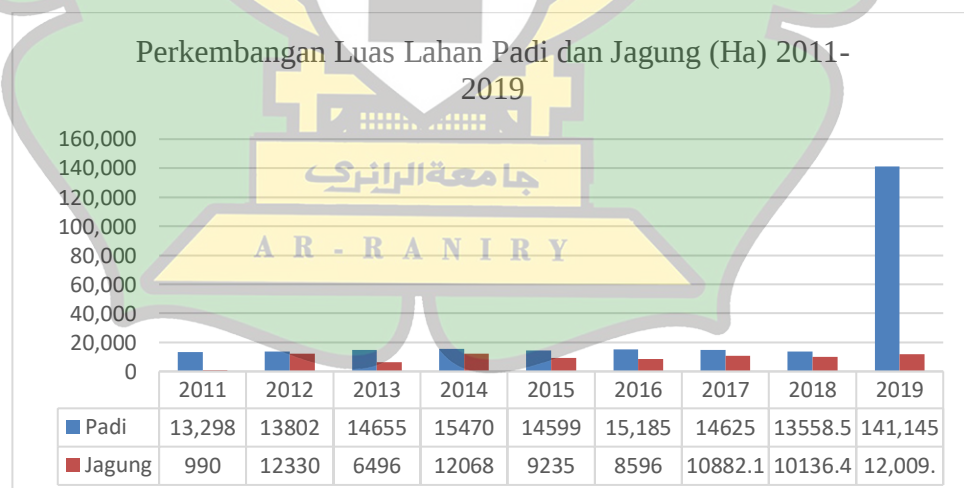
Tabel 4.2
Perkembangan Luas Lahan Pangan Kabupaten Aceh Selatan, 2011-2019

No	Tahun	Padi (Ha)	Jagung (Ha)
1	2011	13.298	990
2	2012	13.802	12330
3	2013	14.655	6496
4	2014	15.470	12068
5	2015	14.599	9235
6	2016	15.185	8596
7	2017	14.625	10882
8	2018	135.585	10136
9	2019	141.145	12009

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka, 2011-2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah luas lahan tanaman pangan padi mengalami dinamika dalam perkembangannya sejak tahun 2011 – 2019. Dimana tahun 2011 luas lahan padi mencapai 13.298 Ha terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 sudah mencapai 15.470 Ha. Kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2017 mencapai 14.625 Ha. Namun naik kembali tahun 2018 menjadi 135.585 bahkan puncaknya tahun 2019 menjadi 141.145 Ha.

Begitu juga dengan perkembangan jumlah luas lahan tanaman pangan jagung mengalami dinamika dalam perkembangannya sejak tahun 2011 – 2019. Dimana tahun 2011 luas lahan jagung mencapai 990 Ha terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 sudah mencapai 12.068 Ha. Kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2018 mencapai 10.882 Ha. Namun naik kembali tahun 2019 menjadi 12.009 Ha.



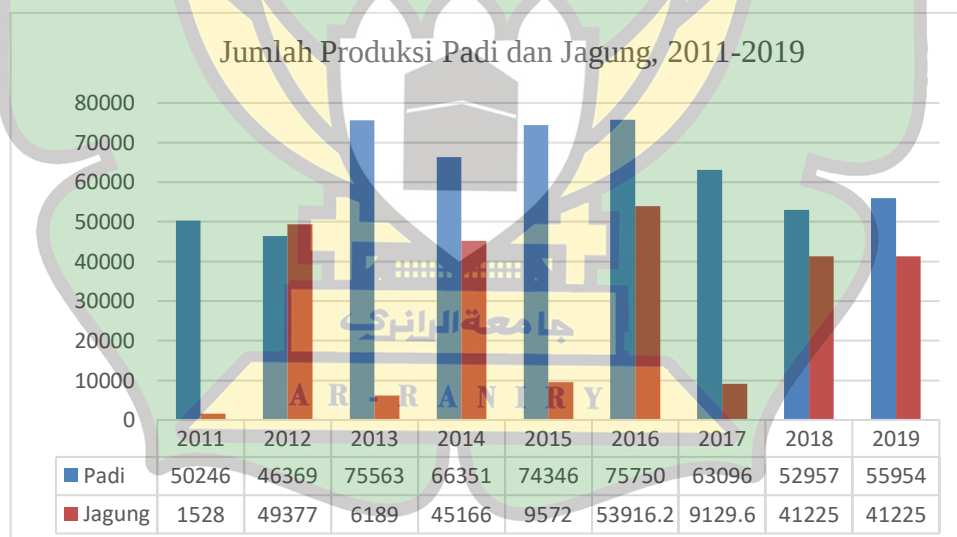
Grafik 4.2
Pekembangan Jumlah Luas Tanaman Pangan dan Jagung, 2011-2019

Perkembangan luas lahan tentu akan mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan. Namun, jika dilihat data perkembangan jumlah produksi

padi dan jagung pada masyarakat petani di Kabupaten Aceh Selatan sejak tahun 2011 – 2019 juga mengalami dinamika, seperti terlihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Pangan Kabupaten Aceh Selatan, 2011-2019

No	Tahun	Padi (ton)		Jagung (ton)
		Produksi	Produktivitas (ton/ha)	
1	2011	50.246	4,41	1.528
2	2012	46.369	3,64	49.377
3	2013	75.563	4,43	6.189
4	2014	66.351	4,56	45.166
5	2015	74.346	6,55	9.572
6	2016	75.750	8,04	53.916,20
7	2017	63.096	7,42	9.129,6
8	2018	52.957	6,30	41.225
9	2019	55.954	6,32	41.225



Grafik 4.3
Pekembangan Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Jagung, 2011-2019

Indikator keberhasilan pengembangan usaha pertanian pangan di Kabupaten Aceh Selatan juga dapat dilihat dari perkembangan irigasi pertanian, khususnya

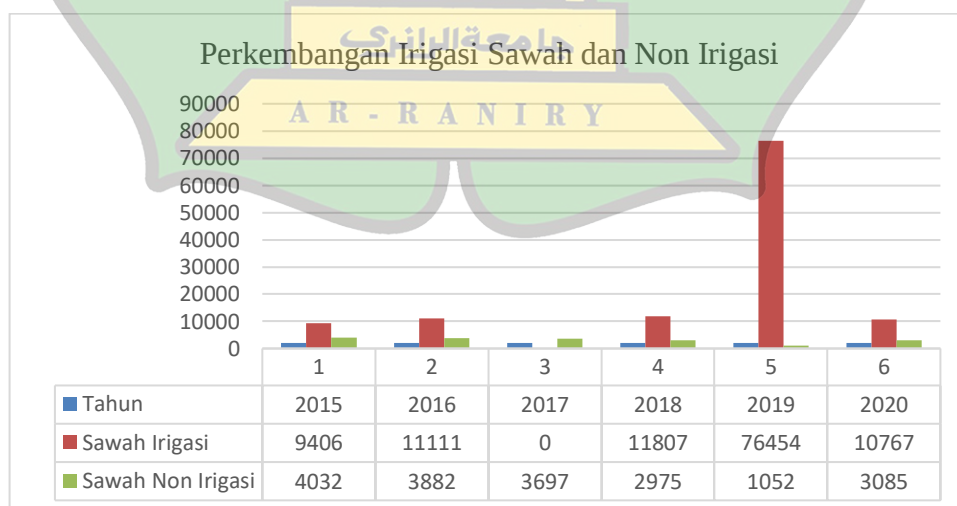
dalam hal ini ialah pertanian padi. Adapun perkembangan irigasi pertanian padi sawah di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 4.4
Perkembangan Irigasi Pertanian Padi Sawah, 2015-2020 Kabupaten Aceh Selatan

No	Tahun	Sawah Irigasi	Sawah Non Irigasi
1	2015	9.406	4.032,0
2	2016	11.111,0	3.882,0
3	2017	10.753,0	3.697,0
4	2018	11.807,0	2.975,0
5	2019	76.454,0	1.052,0
6	2020	10.767,0	3.085,0

Sumber: BPS Provinsi Aceh Dalam Angka, 2015 – 2020

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah irigasi pada pertanian padi sawah di Kabupaten Aceh Selatan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 – 2019. Dimana pada tahun 2015 luas lahan sawah beririgasi mencapai 9.406 Ha dan non irigasi mencapai 4032,0 Ha naik secara signifikan hingga puncaknya ditahun 2019 mencapai 76.454,0 Ha sedangkan yang non irigasi mengalami penurunan menjadi 1.052,0 Ha. Jika dilihat dalam bentuk grafik terlihat sebagai berikut:



Grafik 4.4
Pekembangan Jumlah Luas Irigasi dan Non Irigasi Sawah, 2015-2020

Meningkatnya jumlah luas lahan yang diikuti oleh membaiknya sistem irigasi persawahan di Kabupaten Aceh Selatan berdampak baik terhadap produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas selanjutnya berdampak pula terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Selatan.

1. Nilai yang Diterima Petani

Nilai yang diterima petani Subsektor Tanaman Pangan selama 2019 adalah sebesar 233,88 miliar rupiah. Pada kelompok padi, nilai yang diterima sebesar 197,96 miliar rupiah dengan kontribusi terhadap total nilai yang diterima oleh petani sebesar 84,65 persen. Sementara, nilai yang diterima petani kelompok palawija sebesar 35,90 miliar rupiah dengan kontribusi terhadap total nilai yang diterima oleh petani sebesar 15,35 persen. Jumlah komoditas produksi petani Subsektor Tanaman Pangan adalah sebanyak 6 komoditas, dengan jumlah komoditas produksi kelompok padi sebanyak 1 komoditas, sedangkan pada kelompok palawija sebanyak 5 komoditas.

Tabel 4.5
Jumlah Komoditas, Nilai Produksi, dan Diagram Timbang Indeks Harga yang Diterima Petani Subsektor Tanaman Pangan, Kabupaten Aceh Selatan (2019 = 100)

No	Uraian	Jumlah Komoditas	Nilai Produksi (Rp juta)	Diagram Timbang
1	Jumlah yang Diterima Petani (It)	6	233.858	10.000,00
2	Padi	1	197.962	8.465,08
3	Palawija	5	35.895	1.534,92

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka, 2019.

2. Nilai yang Dibayar Petani

Petani Rata-rata pengeluaran per rumah tangga per tahun yang dibayarkan oleh petani Subsektor Tanaman Pangan selama 2019 adalah

sebesar 22,90 juta rupiah. Rata-rata KRT per tahun sebesar 18,48 juta rupiah dengan kontribusi terhadap total nilai yang dibayar oleh petani sebesar 80,68 persen. Sementara itu, rata-rata BPPBM per tahun yang dikeluarkan oleh petani Subsektor Tanaman Pangan sebesar 4,42 juta rupiah dengan kontribusi terhadap total nilai yang dibayar oleh petani sebesar 19,31 persen.

Tabel 4.6
Jumlah Komoditas, Nilai, dan Diagram Timbang Indeks Harga yang Dibayar
Petani Subsektor Tanaman Pangan, Kabupaten Aceh Selatan
(2019 = 100)

Uraian	Jumlah Komoditas	Nilai (Rp Ribu)	Diagram Timbang
Jumlah yang dibayar Petani (Ib)	354	22.9	10 000,00
a. KRT	295	18.4	8 068,79
- Bahan Makanan	117	83.7	3 658,46
- Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	33	44.0	1 924,02
- Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	42	20.5	897,78
- Sandang	54	12.8	560,15
- Kesehatan	20	60.4	263,74
- Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	13	37.4	163,39
- Transportasi dan Komunikasi	16	13.7	601,26
b. PPBM			
- Bibit/Benih	59	44.2	1 931,21
- Pupuk dan Obat-obatan	4	93.1	406,77
- Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain	18	12.7	558,63
- Transportasi	10	53.8	234,99
- Barang Modal	7	19.6	85,79
- Upah Buruh Tani	10	34.1	148,96
	10	13.3	496,07

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka, 2019.

4.2.2 Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat

Strategi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat tentu tidak bisa dilepaskan dari apa yang sudah dirancang

sebelumnya. Adapun data Renstra tahun 2017 – 2020 Kabupaten Aceh Selatan menyebutkan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Rencana Strategi Bidang Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 2017-2021

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)
1	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per hektar. Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Produksi Sektor Perkebunan Indeks Pertanaman
2	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kontribusi Sarana Pertanian Terhadap Peningkatan Produktivitas Pertanian
3	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengadaan sarana Pertanian dan Perkebunan
4	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Peningkatan Produktivitas Pertanian
5	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Expo yang diikuti
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Populasi Ternak yang di Inseminasi Buatan
6	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kontribusi Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Terhadap Produktivitas Pertanian Jumlah Pengadaan Bibit / Benih Sektor Pertanian
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian
8	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya Data Pengembangan Sektor Pertanian
9	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan	Jumlah Dokumen

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)
	Berkelanjutan/LP2B	
10	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang Terbangun
11	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun
12	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun
13	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang di bangun
14	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang di bangun
15	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Lahan dan Bangunan yang dioptimalkan

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 2021.

Dari tabel diatas dapat menjelaskan bahwa strategi pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat memiliki tujuan sasaran program kegiatan juga merupakan indikator yang terjadi pada usaha pangan masyarakat atau usaha rumah tangga kemudian dengan data tersebut juga kita dapat menelaah bahwa terjadi setiap tahunnya peningkatan kemandirian dan ketahanan pangan yang dilalui menggunakan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian pemerintah sudah cukup baik dalam pengelolaan sumber daya baik itu hewan tumbuhan dan mikroorganisme dalam menunjang pertanian masyarakat yang dapat menjadikan kabupaten Aceh Selatan sebagai wilayah swasembada pangan.

(1) Membentuk Balai Penyuluh

Langkah utama yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengembangkan usaha pangan masyarakat ialah membentuk balai

penyuluhan pertanian dan pangan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Aceh Selatan. Badan penyuluhan ini berada di bawah naungan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan. Badan ini dibentuk untuk melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat petani mulai dari tingkat kecamatan bahkan ke setiap gampong-gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan.

Kami pemerintah Aceh Selatan sudah membentuk balai balai penyuluh setingkat kecamatan dan desa dengan Balai penyuluh itu pula kami berharap kepada masyarakat memanfaatkan sumber daya yang ada di balai penyuluh untuk meningkatkan ketahanan pangan kita di kabupaten ini³⁶

Dari data wawancara di atas menjelaskan bagaimana peran pemerintah untuk menyukseskan ketahanan pangan di kabupaten Aceh Selatan maka pembentukan balai penyuluh merupakan salah satu upaya dalam membangun hal tersebut terwujud di kabupaten Aceh Selatan. Kemudian Saat ini keberadaan Balai Penyuluhan pertanian ini telah melakukan berbagai strategi dalam mengembangkan pertanian di kawasan kecamatan dan gampong dengan melakukan pemberian pengetahuan penuh kepada masyarakat terkait bidang pertanian serta menyalurkan berbagai kebutuhan petani mulai dari pupuk hingga bibit yang unggul kepada masyarakat petani melalui kelompok tani yang sudah ada di tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

(2) Sosialisasi Pengembangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Sosialisasi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan, ketrampilan mengelolai pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang,

³⁶ Wawancara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh selatan, 25 oktober 2021

sanitasi dan keamanan pangan, serta pengelolaan sumber daya keluarga untuk meningkatkan gizi hal ini diwujudkan program tahunan antara lain terdapat beberapa kegiatan yaitu; penanganan daerah rawan pangan, analisis dan pola konsumsi dan suplay pangan. Hal tersebut selaras dengan ungkapan informan yang peneliti wawancarai, beliau mengatakan:

Selain untuk penyuluhan kami juga melakukan sosialisasi pengembangan pangan terhadap masyarakat agar masyarakat mengerti dan tercerahkan bagaimana pentingnya membangun ketahanan pangan terutama di kabupaten Aceh Selatan. dalam sosialisasi ini kami turun ke desa-desa untuk memberi pencerdasan seperti tatacara penggunaan traktor, mengolah dan menebar pupuk serta tehnik panen yang efisien. Hal ini pemerintah lakukan dalam upaya pengembangan ketahanan pangan di kabupaten Aceh Selatan.³⁷

Dari data wawancara di atas tadi memberi gambaran bahwasanya pemerintah sudah melakukan sosialisasi tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga masuk ke daerah rural pedesaan agar teknologi yang sudah ada dapat digunakan oleh masyarakat pertanian desa tujuannya jelas untuk mencapai kabupaten Aceh Selatan dalam ketahanan pangan melalui upaya pengembangan.

(3) Pemberian Bibit dan Pupuk Kepada Masyarakat Petani

Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Selatan dalam mengembangkan usaha pangan masyarakat ialah dengan pemberian bibit unggul kepada masyarakat terutama ialah usaha padi. Dalam hal ini pihak pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Pertaniannya telah melaksanakan program pemberian bibit unggul seperti padi kepada usaha kelompok tani di setiap kecamatan hingga ke desa-desa. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

³⁷ Wawancara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh selatan, 25 oktober 2021

Kami memberikan pupuk bibit kepada masyarakat petani itu sebenarnya sudah ada walaupun limit waktunya tidak bisa ditentukan setahun berapa kali kami memberikan pupuk dan suplai bibit kepada petani tetapi dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan ini sudah melakukan hal-hal tersebut melalui beberapa kebijakan yang bisa dilihat bahwa setiap rapbd kabupaten Aceh Selatan selalu melibatkan ketahanan pangan sebagai salah satu upaya dalam sejahteraan masyarakat walaupun ini dinilai oleh masyarakat belum begitu maksimal kami juga merasakan hal tersebut karena tidak punya limit waktu yang sudah ditentukan atau kalender kerja untuk berapa kali dalam setahun jika kami memberikan pupuk atau bentuk-bentuk lainnya kepada masyarakat petani.³⁸

Pemberian bibit jika tidak diimbangi dengan pupuk serta obat-obatan pelindung usaha tani masyarakat dari serangan penyakit. Dalam hal ini Kabupaten Aceh Selatan juga menyaluri pupuk untuk kebutuhan petani sawah, bahkan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga memberikan obat-obatan kepada masyarakat agar usaha tanaman padinya tidak diganggu hama serta tikus.

(4) Penambahan Irigasi

Aspek yang paling penting lainnya dalam mendukung pengembangan usaha pangan masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan ialah sistem irigasi persawahan yang baik. Selama ini sistem irigasi di setiap lahan sawah Sebagian masih terbatas, bahkan sistem irigasi masih bersifat tradisional yang hanya dibuat oleh para petaninya. Namun, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan saat ini telah membangun beberapa irigasi persawahan serta menambah dan merenovasi sistem irigasi yang sudah rusak. Hal ini dilakukan demi lancarnya saluran air ke seluruh lahan sawah masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

³⁸ Wawancara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh selatan, 25 oktober 2021

(5) Mengembangkan kawasan agropolitan

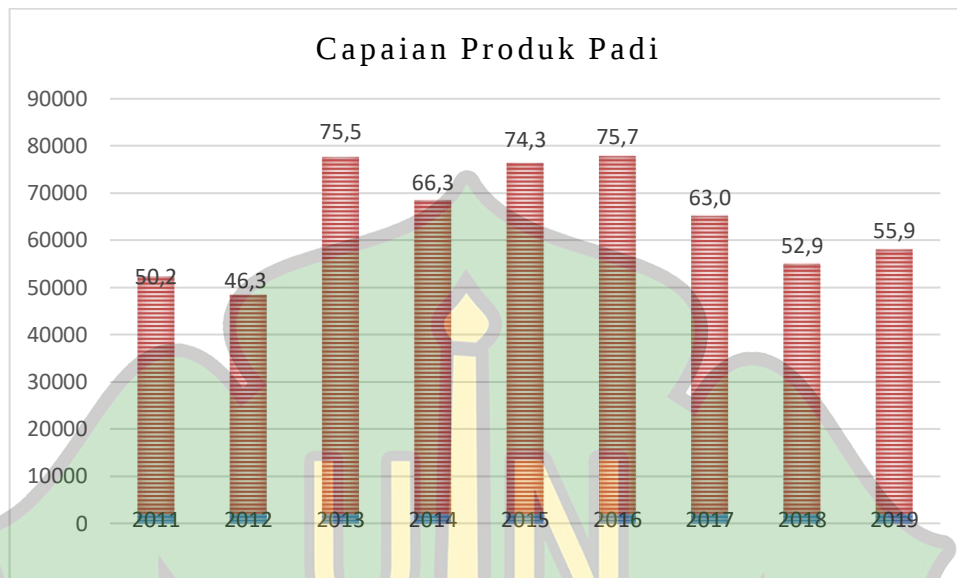
Strategi lainnya yang dilakukan oleh Kabupaten Aceh Selatan dalam upaya pengembangan usaha pangan masyarakat ialah cara dengan mengembangkan Kawasan agropolitan dengan cara pembagian zona agroekologi di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Zona I untuk tanaman kehutanan, Zona II untuk tanaman perkebunan, Zona III untuk agroforestry/ wanatani, Zona IV untuk tanaman pangan dan Zona VI untuk perikanan/ hutan.

Strategi pengembangan usaha pangan masyarakat juga dilakukan dengan penggunaan lahan secara aktual dengan penggunaan lahan menurut zona agroekologi, atau dengan kata lain penggunaan lahan yang ada dimanfaatkan tidak sesuai dengan zona agroekologinya. Hal ini untuk mengetahui terdapatnya komoditas pertanian unggulan yang dapat dikembangkan pada setiap Zona Agro-ekologi, cengkeh, lada, karet, kelapa sawit dan kopi pada Zona II. Komoditas karet, kelapa, cengkeh, padi, jagung dan kacang tanah pada Zona III. Komoditas padi sawah, padi gogo, kacang tanah, kedele, kacang panjang dan jagung pada Zona IV. Perikanan/ tambak seperti ikan bandeng, udang, kepiting dan hutan mangrove pada zona V.

(6) Menetapkan kawasan strategis lumbung padi

Pengembangan lumbung pangan merupakan wujud pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, maka ketersediaan pangan menjadi sangat penting. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu: (1) produksi; (2) pemasukan pangan; dan (3) cadangan pangan. Kawasan lumbung padi yang diterapkan oleh pemerintah

Aceh Selatan ini telah mencapai hasil yang baik, sebagaimana terlihat pada grafik 4.5.



Grafik 4.5
Capaian Produksi Padi di Kabupaten Aceh Selatan

4.2.3 Peluang dan Tantangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat tentu tidak terlepas dari adanya peluang yang mendukung serta tantangan yang menghambatnya, sebagai mana yang diuraikan di bawah ini.

1. Peluang

Peluang yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan, diketahui dari hasil wawancara dengan anggota Badan Penyuluh Pertanian Lapangan, yang membahas tentang peluang sebagai berikut:

Alhamdulillah dek kami sebagai petugas penyuluh lapangan dan pengamat hama sudah memberikan bantuan ke petani atau sarana dan prasarana segala macam, kami selalu memberikan bantuan untuk petani. Misalnya ada serangan hama, kami melaporkan hal tersebut ke pusat,

kemudian kami memberikan obat-obatan untuk membasmi hama tersebut.³⁹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya peran pemerintah dalam hal meningkatkan ketahanan pangan di sektor pertanian, hal tersebut merupakan tugas pokok pegawai Penyuluh Pertanian Lapangan dan Petugas Organisme Pengangkut Tanaman dalam senantiasa mengawal petani untuk menjaga produktifitas pertanian dengan memberikan obat-obatan dan pupuk bersubsidi untuk membasmi hama yang tujuannya terbentuknya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan petani agar dapat meningkatkan pendapatannya dari hasil pertaniannya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Pertanian dan Pangan dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana ke petani, dengan melalui hubungan kerja sama dengan Pegawai Penyuluh Lapangan dan Petugas Organisme Pengangkut Tanaman yang memiliki peran penting dalam pengawal petani untuk meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Selatan, yang mengemukakan sebagai berikut:

Berbicara peluang tentang pangan, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan lahan perkarangan atau ketahanan pangan rumah tangga. Program tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi beragam dan berimbang.⁴⁰

Keterangan di atas menjelaskan bahwa bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Selatan sebagai pelaksana sebagai mana kewenangan urusan Pemerintah Daerah dalam memenuhi ketahanan pangan sudah dijalankan

³⁹ Wawancara Pihak Penyuluhan Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 15 Desember 2021

⁴⁰ Wawancara kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Selatan Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 11 Desember 2021

sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Selatan khususnya di bidang pengembangan usaha pangan sudah mensosialisasikan ke masyarakat dalam menjaga pangan dan menggunakan benih unggulan, agar meningkatkan produktifitas kebutuhan pangan di Kabupaten Aceh Selatan yang beragam dan bergizi. Sebagaimana yang disampaikan salah satu ketua kelompok tani yakni sebagai berikut:

Yang menjadi kekuatan kelompok tani di sini adalah adanya bantuan dari pemerintah, adanya pembinaan untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kemampuan kelompok tani, misalnya yang dulunya hasil pertanian yang masih rendah. Tapi karena adanya bantuan dari pemerintah, adanya pembinaan, pelatihan yang dilakukan penyuluh pertanian maka hasil pertanian meningkat.⁴¹

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa adanya peran pemerintah dalam hal meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam menjalankan usaha taninya dengan cara adanya dukungan atau bantuan dari pemerintah, adanya pelatihan, adanya pembinaan sehingga langkah pemerintah 48 dalam membina kelompok tani ini hasilnya mulai meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dengan kondisi petani yang dulunya hasil pertanian biasa-biasa saja tapi dengan adanya peran pemerintah yang membuat hasil pertanian meningkat di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam artian bahwa kelompok tani tidak berarti tanpa ada kerja sama dengan pemerintah yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam hal pembinaan dan pelatihan kepada kelompok tani sehingga terwujudnya kecukupan kebutuhan pangan bagi petani. Hal ini sebagai mana yang disampaikan oleh kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Selatan, yakni sebagai berikut:

⁴¹ Wawancara Salah Satu Ketua Kelompok Tani di Kabupaten Aceh Selatan, 10 Desember 2021

Dalam permasalahan alih fungsi lahan tentunya bukan lagi sesuatu yang perlu di kawatirkan karena Saat ini sudah ada larangan mengalih fungsikan lahan yang masih berproduksi. Pemerintah juga melakukan kebijakan alih fungsi lahan di Kabupaten Aceh Selatan, sehingga adanya larangan membangun perumahan dilahan yang masih berproduksi.⁴²

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa adanya strategi pemerintah dalam hal melindungi dan mencegah sawah produktif untuk dialih fungsikan menjadi lahan yang tidak produktif seperti pembangunan perumahan dan alih fungsi lahan. Tentunya upaya tersebut dapat terlaksana karena adanya kerja sama pemerintah dengan badan penyuluh pertanian dan kepala desa dalam mensosialisasikan ke masyarakat maupun investor luar yang ingin yang mengalih fungsikan lahan pertanian. Dengan adanya peraturan tersebut dapat menemukan solusi pemerintah dalam meningkatkan luas wilayah lahan pertanian yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Sementara itu hasil wawancara dengan petugas Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Aceh Selatan, disebutkan bahwa:

Kalo berbicara peluang banyak dek, apalagi saat ini kegiatan kami di resfon baik oleh pemerintah, itulah yang menjadi peluang bagi kita karena adanya dukungan dana dari pemerintah sehingga dalam melakukan usaha taninya bisa maksimal.⁴³

Wawancara di atas berbicara soal peluang dimana peluang terjadi apabila hubungan antara petani dengan pemerintah berjalan baik terutama adanya dukungan penuh dari pemerintah dalam memberikan bantuan seperti dana ataupun sarana dan prasarana ke petani untuk mengembangkan usaha taninya sehingga dapat terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Selatan. Berbicara soal

⁴² Wawancara kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Selatan Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 11 Desember 2021

⁴³ Wawancara Pihak Penyuluhan Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 15 Desember 2021

pengembangan usaha pangan peluang sangat besar di Kabupaten Aceh Selatan yaitu dilihat dari bagaimana peran petugas penyuluh lapangan dalam mendampingi petani untuk menjaga lahan pertanian dan melakukan pembinaan bagi petani untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar dapat mandiri dan bisa meningkatkan kesejahteraannya. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris kelompok tani, yang mengemukakan sebagai berikut:

Kalau kita kelompok tani di sini mempunyai peluang, semua baik dari tanaman pangan dan lain-lain, banyak peluang petani di sini, kalau petani lain tidak tau karena ada bantuan dari pemerintah dalam hal peningkatan penghasilan tanaman pangan yang dulunya penghasilan saya biasa-biasa saja tapi dengan adanya dukungan dana dari pemerintah sehingga hasil pertanian meningkat contohnya padi dengan adanya bantuan pupuk, obat-obatan untuk membasmi hama sehingga hasil pertanian saya meningkat.⁴⁴

Dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa berhubungan soal peluang dimana peluang terjadi apabila seseorang menjalankan sebuah pekerjaan usaha taninya dengan serius atau setidaknya untuk mendapatkan peluang itu adanya dukungan bantuan dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Berbicara soal peluang dalam pengembangan pangan petani yaitu dimana peluang sangat besar bagi kelompok tani dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok tani untuk mampu mandiri dan bisa meningkatkan kesejahteraannya dalam memenuhi ketahanan pangannya dengan bantuan atau adanya dukungan dana dari pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan.

Jika peluang tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, hasil pertanian akan meningkat dan berdampak pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta apabila lahan pertanian masih luas karena masih banyak lahan

⁴⁴ Wawancara Salah Satu Sekretaris Kelompok Tani di Kabupaten Aceh Selatan, 10 Desember 2021

kosong itu memungkinkan petani dan pemerintah untuk berhasil meningkatkan ketahanan pangan. Berikut hasil wawancara dengan informan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan bahwa:

Kalo peluangnya dek, terutama dalam mengatasi gizi buruk di Kabupaten Aceh Selatan yaitu akan di jalankan program pembagian ternak untuk masyarakat petani miskin. Kelompok tani akan dibagikan ternak ayam per kelompok tani, kemudian hasilnya akan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan untuk menanggulangi masalah gizi buruk.⁴⁵

Keterangan di atas mengungkapkan bahwa peluang terjadi apabila seseorang menjalankan sebuah pekerjaan dengan serius atau setidaknya untuk mendapatkan peluang itu. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengatasi kasus gizi buruk di Kabupaten Aceh Selatan sudah membuat strategi untuk mengatasi ke miskinan pangan masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada petani untuk di kelolah agar untuk memenuhi kebutuhan gizi yang beragam dan berimbang. Dengan adanya bantuan pemerintah sangat membantu masyarakat tani dalam meningkatkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraannya.

2. Tantangan

Strategi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, namun juga terdapat berbagai tantangan. Terkait hal ini peneliti memperoleh keterangan dari pihak Penyuluh Pertanian Lapangan dan Anggota Badan Penyuluh Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Selatan, dan Kelompok tani di Kabupaten Aceh Selatan. Menurut hasil wawancara dengan pihak petani dikatakan sebagai berikut:

⁴⁵ Wawancara Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 11 Desember 2021

Jadi mengenai kelemahannya itulah tadi mengenai obat-obatan yang masih terbatas. Hal tersebut disebabkan oleh dana atau anggaran yang di sediakan pemerintah masih belum cukup maksimal untuk masyarakat. Jadi kami sebagai petugas hanya bisa memberikan seadanya apa yang di berikan pemerintah untuk masyarakat.⁴⁶

Berdasarkan ungkapan di atas, menunjukkan bahwa adanya tantangan dalam aspek dana atau anggaran yang terbatas dari pemerintah yang seharusnya dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil taninya. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih peduli dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang bertujuan meningkatkan pengembangan pangan di Kabupaten Aceh Selatan.

Tidak hanya itu meningkatkan kesejahteraan petani pemerintah harus melakukan penyuluhan secara maksimal kepada petani dan memberikan bantuan dana yang cukup untuk menunjang petani dalam usaha taninya. Karena dalam peningkatan pangan di pengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Apabila sumber daya manusia memiliki motivasi tinggi dan dana yang cukup memadai, maka kemajuan dalam memperoleh kecukupan pangan akan dipastikan akan semakin membaik. Oleh karena itu perlu kesadaran pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan petani untuk meningkatkan sumber daya petani. Dan pemerintah harus memberikan dukungan penuh kepada petani agar petani persatu dalam melakukan usaha taninya. Berikut hasil wawancara dengan ketua kelompok tani, yang membahas tentang tantangan bahwa:

Yang menjadi kendala kita disini yaitu dana. Seandainya dana dari pemerintah cukup semua petani mendapatkan bantuan, misalnya di Kabupaten Aceh Selatan ada 1000 lebih kelompok tani sedangkan dana dari pemerintah berapa jie untuk di bagikan ke semua kelompok tani, itulah yang menjadi kendala dalam pengembanga pangan di Kabupaten Aceh Selatan. Contoh lagi misalnya ada pembagian traktor sekitar 30

⁴⁶ Wawancara Pihak Petani Kabupaten Aceh Selatan, 11 Desember 2021

yunit untuk dibagikan, sedangkan kelompok tani 1000 lebih, itulah tidak semua kelompok tani dapat, yang kita kasih hanya yang aktif saja.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam peran pemerintah berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan masih terdapat tantangan pemerintah dalam hal membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraannya yang menjadi kendala utama utama adalah dana yang terbatas. Maka dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus memperbaiki kelemahan-kelemahan itu sehingga kebutuhan akan pangan dapat ditingkatkan dan dapat meningkatkan pula kedaulatan pangan dari suatu daerah tersebut. Hal ini harus dilakukan dikarenakan itu sebuah tanggung jawab pemerintah selaku pelayan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Selatan. Berikut hasil wawancara dengan ketua kelompok tani, yang juga membahas tentang tantangan pengembangan usaha pangan masyarakat:

Menurut saya tantangan pertanian disini itu masih banyak dek. Tetapi untuk sekarang ini sudah lumayan bagus peran pemerintah memperhatikan petani. Cuma hanya kurang usulan dari kelompok tani biasanya anggota kelompok tani tidak aktif, kadang-kadang aktif kadang-kadang tidak, kadang ada perintah dari pemerintah baik dari penyuluh tapi kadang sebagian anggota kelompok tani tidak mau mengikuti anjuran pemerintah, tapi memang pemerintah dalam hal memberikan bantuan kepada kita kadang dapat kadang tidak. Penyuluhan juga kadang-kadang datang satu kali seminggu, kadang juga tidak tentu.⁴⁸

Keterangan di atas menunjukkan bahwa adanya tantangan pemerintah dan masyarakat petani yakni masyarakat di tingkat kecamatan dan gampong masih banyak yang malas atau belum mengetahui keberadaan penyuluh pertanian sebagai pendamping petani dalam menjaga pangan. Hal tersebut dapat dilihat

⁴⁷ Wawancara Ketua Kelompok Tani Kabupaten Aceh Selatan, 16 Desember 2021

⁴⁸ Wawancara Ketua Kelompok Tani Kabupaten Aceh Selatan, 16 Desember 2021

kurangnya dalam bekerjasama dengan sesama petani dan pemerintah dalam membangun peningkatan hasil taninya. Begitu pula peran pemerintah yang seharusnya menunjang petani dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam melakukan usaha taninya.

Pemerintah dalam hal ini seharusnya juga melakukan penyuluhan kepada petani dengan maksimal sehingga kemandirian kelompok petani dapat tercipta, dalam artian bagaimana peran penyuluh pertanian dalam melaksanakan perannya secara maksimal sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Maka dibutuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Aceh Selatan. Maka dari itu juga masyarakat tani membutuhkan konsistensi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan kepada petani. Berikut hasil wawancara dengan kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Selatan, yang mengatakan bahwa:

Masalah gizi buruk sebenarnya sudah ada penanganan dari pemerintah. Hanya saja masih banyak masyarakat yang kurangnya kesadaran dalam memenuhi gizi yang beragam yang membuat surplus pangan yang tidak menjamin pemenuhan gizi yang ada di wilayah ini.⁴⁹

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa adanya tantangan dari masyarakat yang kurang mengetahui pentingnya keragaman pangan dalam pemenuhan gizi yang cukup. Dalam hal ini yang harus ditingkatkan oleh pemerintah yaitu sosialisasi yang dilakukan pemerintah ataupun pegawai penyuluh pertanian dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat masih perlu ditingkatkan, dalam artian dibutuhkan kerja keras dari pemerintah dalam meningkatkan

⁴⁹ Wawancara kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Selatan Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, 11 Desember 2021

swasembada pangan yang beragam dan bergizi. Maka dengan itu pemerintah harus memperbaiki kelemahan-kelemahan itu sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dan pemerintah harus memberikan motivasi kepada petani sehingga petani dalam menjalankan usaha taninya dengan maksimal.

Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang diluncurkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian memiliki tujuan menyerap produk pertanian dengan harga yang menguntungkan petani, mendukung kestabilan pasokan dan harga pangan pokok dan strategis, dan memberikan kemudahan kepada konsumen dalam mengakses bahan pangan pokok dan strategis dengan harga yang wajar. Kegiatan PUPM dalam mencapai tujuannya melakukan pemotongan rantai pasok bahan pangan menjadi lebih pendek agar keuntungan yang diperoleh masing-masing rantai menjadi lebih adil.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.Strategi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat ialah dengan membentuk balai penyuluh, sosialisasi pengembangan dan ketahanan pangan masyarakat, pemberian bibit dan pupuk kepada masyarakat petani, penambahan irigasi, mengembangkan kawasan agropolitan dan menetapkan kawasan strategis lumbung padi di Kabupaten Aceh Selatan. Strategi tersebut menurut peneliti sudah sangat baik dijalankan oleh pemerintah Aceh Selatan dalam rangka pengembangan usaha pertanian pangan masyarakat.

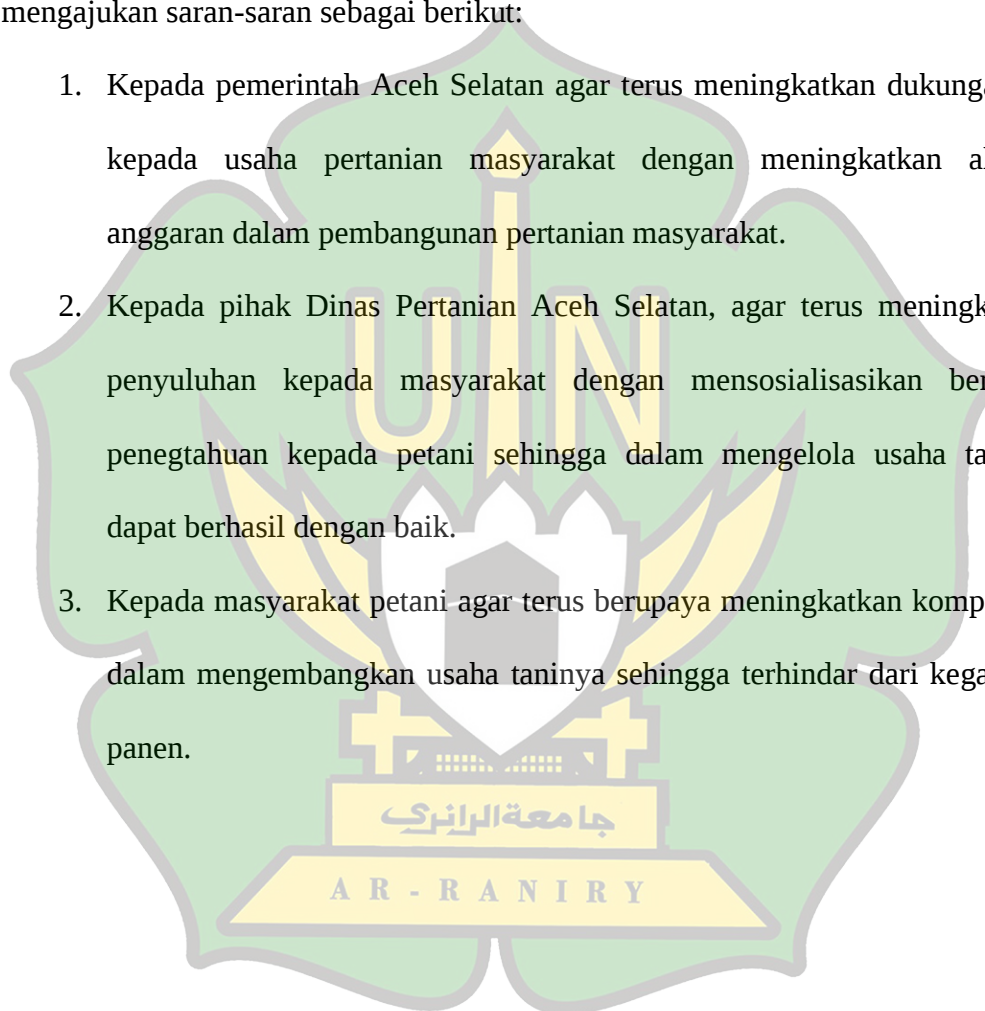
5.2.Peluang Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat kuatnya kerja sama elemen pemerintah dalam pengembangan usaha pangan masyarakat, tersediaanya benih yang unggul, semangat masyarakat dalam Bertani yang tinggi, ketersediaan lahan pertanian pangan yang memadai, dukungan fasilitas dan obat-obatan yang cukup. Sedangkan tantangan Pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan alokasi anggaran yang terbatas, serangan penyakit dan hama terhadap usaha tani masyarakat, terjadinya gagal panen dan tenaga sumber daya manusia petani yang masih minim. Untuk mengatasi tantangan ini pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dapat

melakukan peningkatan SDM dikalangan petani dalam mengatasi usaha taninya dari gagal panen.

B. Saran

Harapan peneliti terhadap penelitian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Aceh Selatan agar terus meningkatkan dukungannya kepada usaha pertanian masyarakat dengan meningkatkan alokasi anggaran dalam pembangunan pertanian masyarakat.
2. Kepada pihak Dinas Pertanian Aceh Selatan, agar terus meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan berbagai pengetahuan kepada petani sehingga dalam mengelola usaha taninya dapat berhasil dengan baik.
3. Kepada masyarakat petani agar terus berupaya meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan usaha taninya sehingga terhindar dari kegagalan panen.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2014.
- Arif Syaifuddin, *Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dalam Upaya Peningkatan PDRB Kabupaten Pati*, Skripsi, Semarang: UNS, 2013.
- Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2013.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- BPS Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka, 2011 – 2020
- BPS Provinsi Aceh Dalam Angka, 2015 – 2020
- Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2015.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*, Yogyakarta: Analisis. Gava Media, 2016.
- Joko, dkk, *Strategi Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantul dengan Pendekatan A'WOT*, Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Vol. 19, No.3, November 2016.
- Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.

Mosher, *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*, Jakarta: Yasaguna, 2014.

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangnga, 2013.

Rizki Irfan, Analisis Perbandingan Kebijakan Bupati Akmal Ibrahim dan Jufri Hasanuddin dalam Menjamin Ketahanan Pangan Pada Bidang Padi di Kabupaten Aceh Barat Daya, *Skripsi*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017.

Robinso Tarigan, *Ekonomi Regional Teori & Aplikasi*, Jakarta: Bumi Perkasa, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS, 2016.

Tulus T.H Tambunan, *Perkembangan Sektor Pertanian Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.

Winarno dan Anderson, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, Yogyakarta :Med. Press. 2017.

Zakiah, Pemetaan Komoditas Unggulan Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Agrisepe Vol (16) Nomor 1* , 2015.



INSTRUMEN WAWANCARA

PERTANYAAN UNTUK KEPALA DINAS PERTANIAN

4. Sejak kapan pemerintah Aceh Selatan memprogramkan pengembangan pangan masyarakat?

Jawaban:

.....

5. Apa saja program pemerintah Aceh Selatan di bidang usaha pangan masyarakat?

Jawaban:

.....

6. Apa saja jenis usaha pangan yang menjadi program utama pemerintah Aceh Selatan?

Jawaban:

.....

7. Strategi apa yang dijalankan oleh pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

Jawaban:

.....

8. Apa saja bentuk upaya pemerintah Aceh Selatan dalam mengembangkan usaha pangan?

Jawaban:

.....

9. Dimana saja pusat lokasi utama pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

Jawaban:

.....

.....

10. Apa yang diberikan oleh pemerintah Aceh Selatan kepada masyarakat petani dalam mengembangkan usaha pangan?

Jawaban:

.....

.....

11. Apa saja bentuk keberhasilan pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

Jawaban:

.....

.....

12. Apa saja peluang Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

Jawaban:

.....

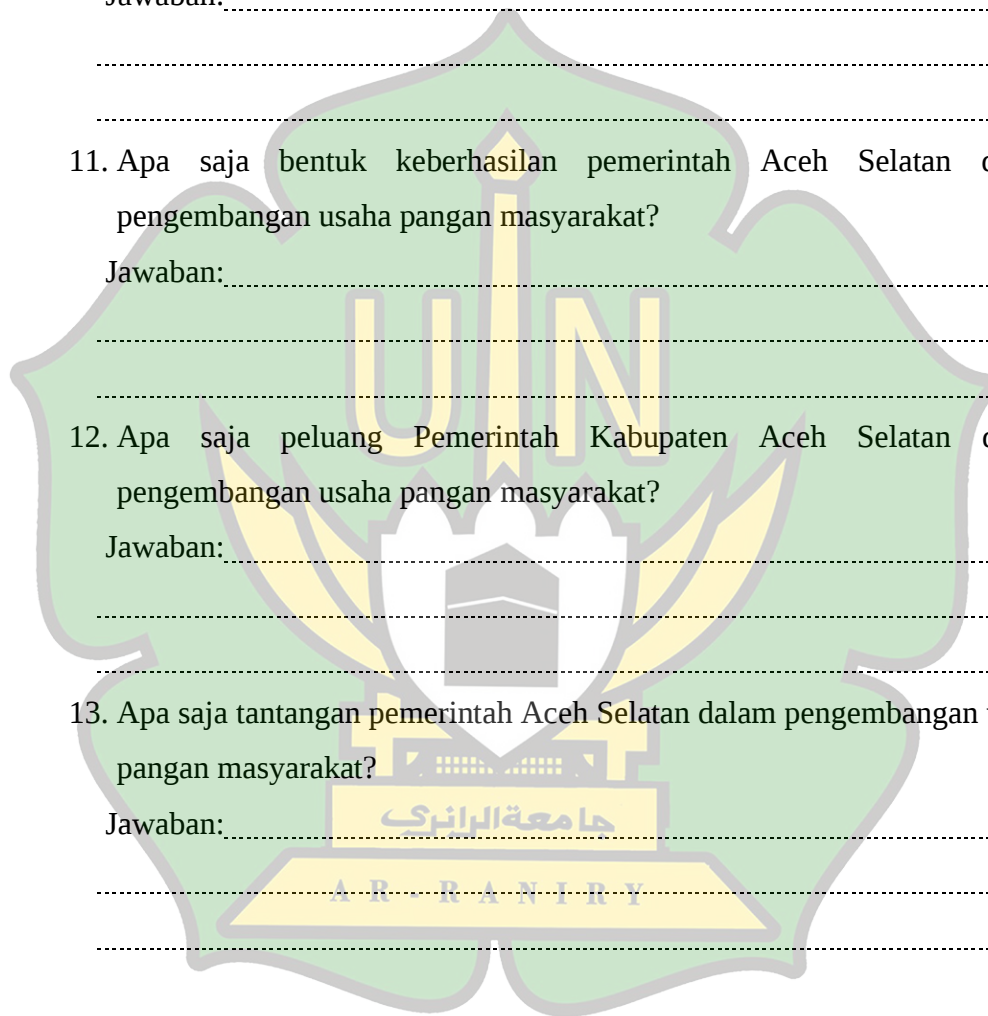
.....

13. Apa saja tantangan pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

Jawaban:

.....

.....



PERTANYAAN UNTUK DINAS PERTANIAN KAB. ACEH SELATAN

14. Sejak kapan pemerintah Aceh Selatan memprogramkan pengembangan pangan masyarakat?

Jawaban:.....

.....

15. Apa saja program pemerintah Aceh Selatan di bidang usaha pangan masyarakat?

Jawaban:.....

.....

16. Apa saja jenis usaha pangan yang menjadi program utama pemerintah Aceh Selatan?

Jawaban:.....

.....

17. Strategi apa yang dijalankan oleh pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

Jawaban:.....

.....

18. Apa saja bentuk upaya pemerintah Aceh Selatan dalam mengembangkan usaha pangan?

Jawaban:.....

.....

19. Dimana saja pusat lokasi utama pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

Jawaban:.....

.....

20. Apa yang diberikan oleh pemerintah Aceh Selatan kepada masyarakat petani dalam mengembangkan usaha pangan?

Jawaban:.....
.....
.....

21. Apa saja bentuk keberhasilan pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

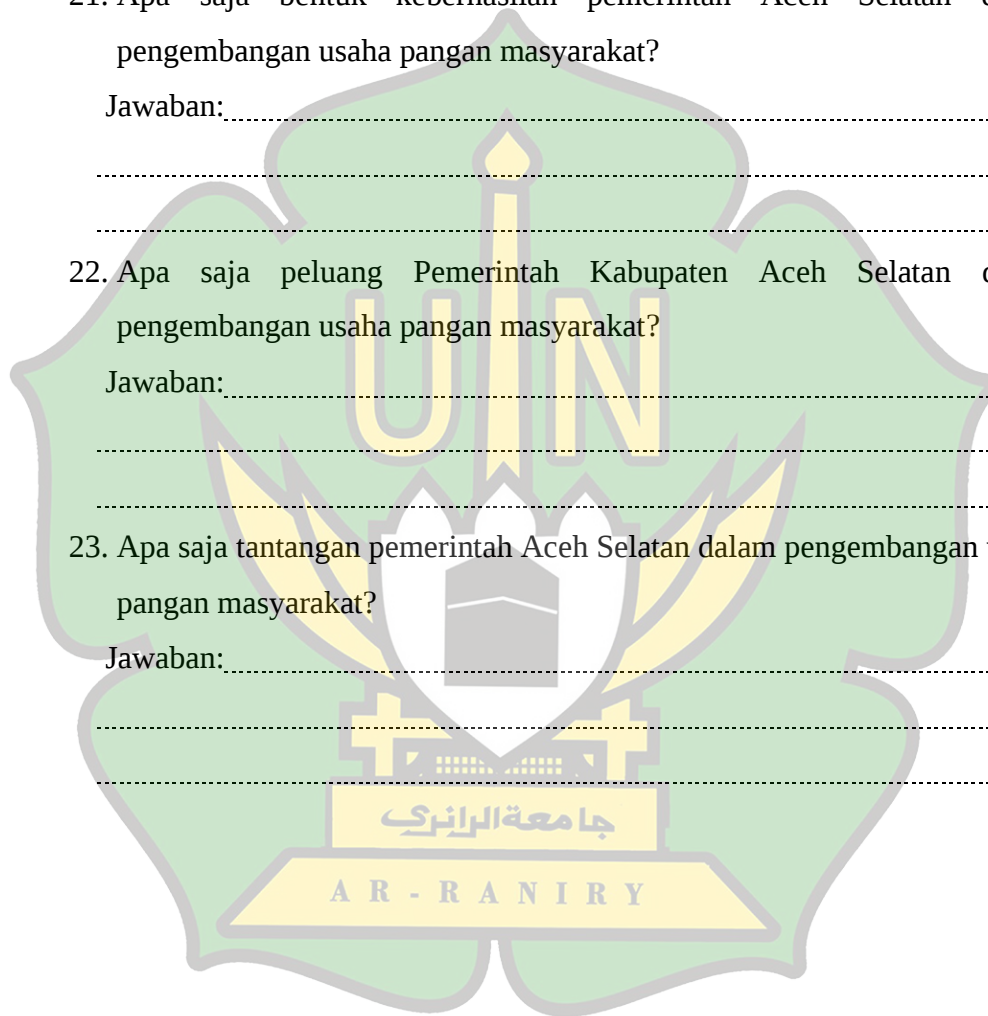
Jawaban:.....
.....
.....

22. Apa saja peluang Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

Jawaban:.....
.....
.....

23. Apa saja tantangan pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

Jawaban:.....
.....
.....



PERTANYAAN UNTUK PENYULUH PERTANIAN

24. Sejak kapan pemerintah Aceh Selatan memprogramkan pengembangan pangan masyarakat?

Jawaban:.....

.....

25. Apa saja program pemerintah Aceh Selatan di bidang usaha pangan masyarakat?

Jawaban:.....

.....

26. Apa saja jenis usaha pangan yang menjadi program utama pemerintah Aceh Selatan?

Jawaban:.....

.....

27. Strategi apa yang dijalankan oleh pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

Jawaban:.....

.....

28. Apa saja bentuk upaya pemerintah Aceh Selatan dalam mengembangkan usaha pangan?

Jawaban:.....

.....

29. Dimana saja pusat lokasi utama pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

Jawaban:.....

.....

30. Apa yang diberikan oleh pemerintah Aceh Selatan kepada masyarakat petani dalam mengembangkan usaha pangan?

Jawaban:.....
.....
.....

31. Apa saja bentuk keberhasilan pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

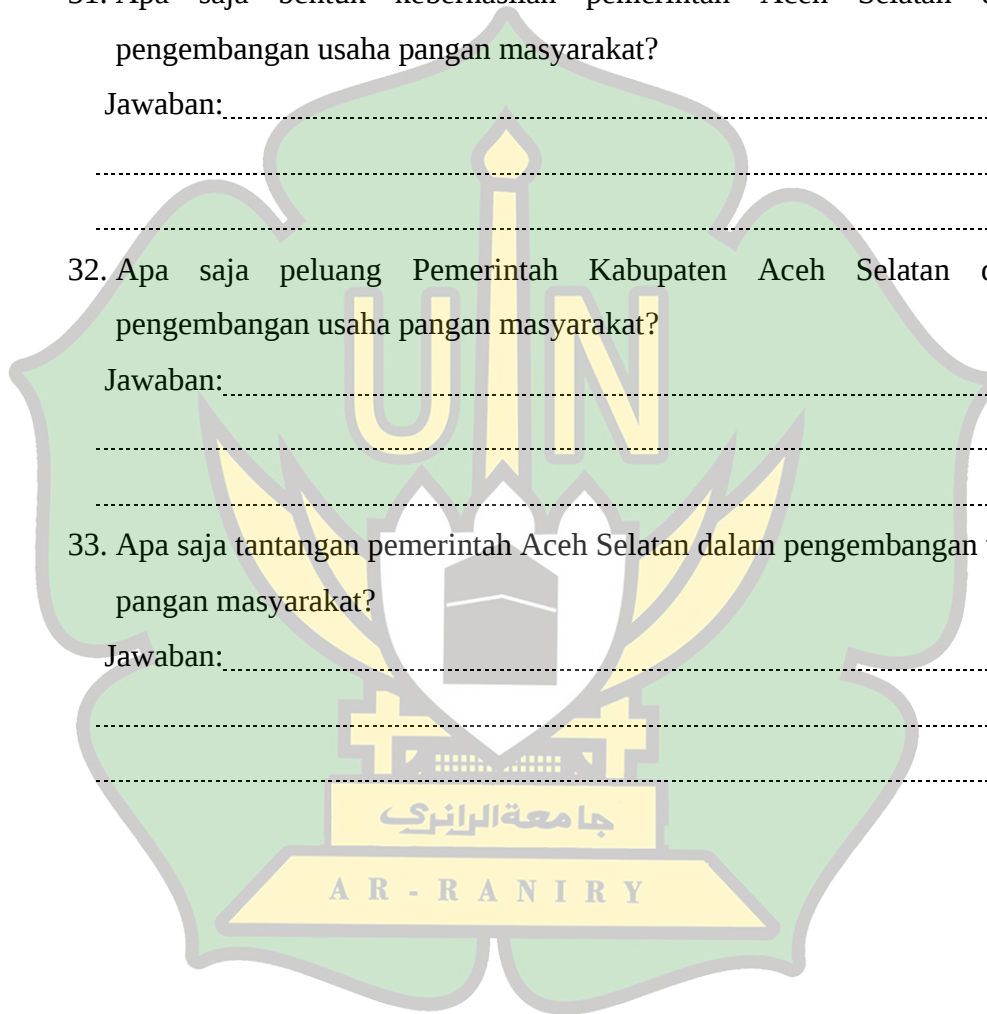
Jawaban:.....
.....
.....

32. Apa saja peluang Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

Jawaban:.....
.....
.....

33. Apa saja tantangan pemerintah Aceh Selatan dalam pengembangan usaha pangan masyarakat?

Jawaban:.....
.....
.....



PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT PETANI

34. Sejak kapan bapak memulai bekerja sebagai petani?

Jawaban:

.....

.....

35. Apa saja jenis usaha pertanian yang kerjakan saat ini?

Jawaban:

.....

.....

36. Apakah bapak pernah mendapan bantuan dari pemerintah Aceh Selatan dalam mengembangkan usaha tani? Jika pernah apa jenis bantuannya?

Jawaban:

.....

.....

37. Apakah pihak pemerintah Aceh Selatan pernah memberikan sosialisasi terkait usaha pertanian? Jika pernah, bagaimana bentuk sosialisasinya?

Jawaban:

.....

.....

38. Bagaimana proses penyuluhan yang diberikan pemerintah Aceh Selatan terkait pertanian terhadap masyarakat?

Jawaban:

.....

.....

39. Apa saja yang mendukung usaha tani yang bapak kerjakan selama ini?

Jawaban:

.....

.....

40. Apa saja yang menjadi kendala bapak dalam menjalankan usaha pertanian?

Jawaban:.....

.....

.....



DOKUMENTASI



Wawancara dengan penyuluh pertanian Kab. Aceh Selatan



Wawancara dengan Kadis Pertanian Kab. Aceh Selatan



Masyarakat Petani Pangan



Ketua Kelompok Petani Pangan